



**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DESA
BANDAR SETIA KABUPATEN
DELI SERDANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

IRA WIRAWATI PURBA

NPM 1715100389

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

MEDAN

2021



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

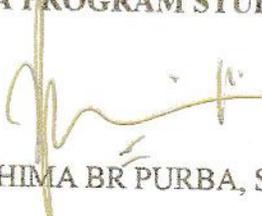
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IRA WIRAWATI PURBA
NPM : 1715100389
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWAS
INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA
BANDAR SETIA DELI SERDANG

MEDAN, MEI 2021

KETUA PROGRAM STUDI


DR. RAHIMA BR PURBA, SE, M.Si, AK, CA

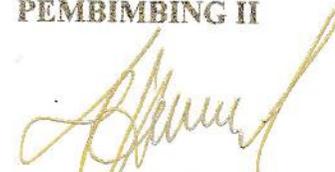



DR. ONNY-MEDALINE, SH., M.Kn

PEMBIMBING I


DR. RAHIMA BR PURBA, SE, M.Si, AK, CA

PEMBIMBING II


SUWARNO, SE, MM



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SERJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : IRA WIRAWATI PURBA
NPM : 1715100389
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWAS
INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA
BANDAR SETIA DELI SERDANG

KETUA

(Puja Rizqy Ramadhan, SE.,M.Si)

ANGGOTA I

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., AK., CA)

ANGGOTA II

(Suwarno, SE., MM)

ANGGOTA III

(Drs Abdul Hasyim Batubara, AK., MM)

ANGGOTA IV

(Handriyani Dwilita, SE., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ira wirawati Purba
NPM : 1715100389
Fakultas Program Studi : SOSIAL SAINS AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWAS
INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA
BANDAR SETIA DELI SERDANG

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelolah, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akedemis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian ini diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

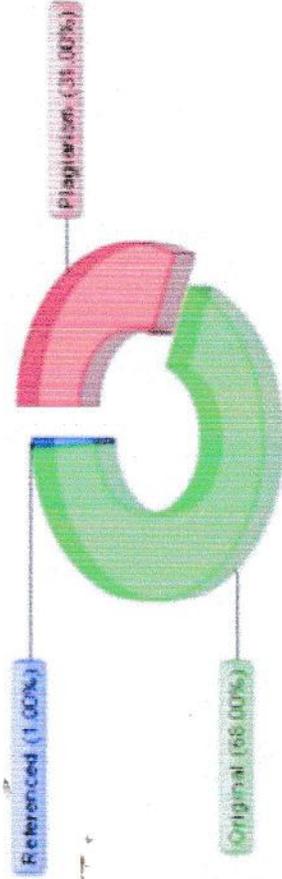
Comparison Preset: Rewrite Detected language:

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 41



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Rahima Br Purba, SE, M.Si, AK, CA
 Dosen Pembimbing II : suwamo, SE, MM
 Nama Mahasiswa : IRA WIRAWATI PURBA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100389
 Bidang Pendidikan : Strata I (SI)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWAS INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA BANDAR SETIA DEU SERDANG

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
5-2021	Perbaiki kata Pengantar - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Cover.	<i>[Handwritten initials]</i>	
5-2021	Acc sidang meja hijau <i>[Signature]</i> 27/5/2021 DP II	<i>[Handwritten initials]</i>	

Medan, 20 Mei 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



[Handwritten signature]
 Dr. Bambang Widjanarko,

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4238/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: IRA WIRAWATI PURBA
: 1715100389

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Akuntansi

nya terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus mendaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 27 Mei 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


UNPA
INDONESIA

Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen: FM-PERPUS-06-01

: 01

Ektif : 04 Juni 2015

Acc jilid lux

05/07 2021

Ace jilid lux

08/08/2021

DP II



**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DESA
BANDAR SETIA KABUPATEN
DELI SERDANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

IRA WIRAWATI PURBA

NPM 1715100389

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: IRA WIRAWATI PURBA
Tgl. Lahir	: SIPOLDAS / 08 Mei 1997
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1715100389
Program Studi	: Akuntansi
Spesialisasi	: Akuntansi Sektor Publik
Persyaratan Kredit yang telah dicapai	: 127 SKS, IPK 3.50
Nomor Hp	: 082275324746

dan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH FRAUD PADA BADAN PUSAT STATISTIKO

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWAS INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA BANDAR SETIA DEU SERDANG

Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

(Signature)
(Suwarno, SE, MM)

Medan, 22 Oktober 2020

Pemohon,

(Signature)
(Ira Wirawati Purba)

Tanggal :

Disahkan oleh :

Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.)

Tanggal :

Disetujui oleh:

Ka. Prodi Akuntansi

(Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Suwarno, SE., MM)



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : IRA WIRAWATI PURBA
NPM : 1715100389
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Suwarno, SE., MM
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA BANDAR SETIA KABUPATEN DELI SERDANG

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
20 Maret 2021	Acc Seminar Proposal	Disetujui	
07 Mei 2021	acc sidang	Disetujui	
10 Agustus 2021	acc jilid lux	Disetujui	

Medan, 10 Agustus 2021
Dosen Pembimbing,

Suwarno, SE., MM.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : IRA WIRAWATI PURBA
 NPM : 1715100389
 Program Studi : Akuntansi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu
 Dosen Pembimbing : Dr Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.
 Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA BANDAR SETIA KABUPATEN DELI SERDANG

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
20 Maret 2021	ACC Seminar Proposal	Disetujui	
27 Mei 2021	ACC Sidang	Disetujui	
06 Juli 2021	Acc Jilid Iux	Disetujui	

Medan, 10 Agustus 2021
 Dosen Pembimbing,



Dr Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : IRA WIRAWATI PURBA
N.I.P. M : 1715100389
Tempat/Tgl. Lahir : Sipoldas / 08 Mei 1997
Alamat : Jl. Panci 34 B Ayahanda
No. HP : 082275324746
Nama Orang Tua : Marojahan Purba/Norma Siallagan
Keahlian : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Judul : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA BANDAR SETIA KABUPATEN DELI SERDANG

Dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2012-038

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : DR. RAHIMA BR PURBA, SE, M.Si, AK, CA
Dosen Pembimbing II : SUWARNO, SE, MM
Nama Mahasiswa : IRA WIRAWATI PURBA
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1715100389
Jenjang Pendidikan : STRATA 1(S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWAS INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA BANDAR SETIA DELI SERDANG

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
5/5-2021	Perbaikan materi proposal		
5/5-2021	Belum sinkron pembahasan dgn rumusan masalah. Di pembahasan kaitkan dgn TIKET kesimpulan = Rumusan Masalah.		
5/5-2021	ACC Siday		

Medan, 24 Mei 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 10 Agustus 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRA WIRAWATI PURBA
Tempat/Tgl. Lahir : Sipoldas / 08 Mei 1997
Nama Orang Tua : Marojahan Purba
N. P. M : 1715100389
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 082275324746
Alamat : Jl. Panci 34 B Ayahanda

Ditang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI
KONTROL PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA BANDAR SETIA KABUPATEN
SERDANG, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Tersampir surat keterangan bebas laboratorium
- Tersampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Tersampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Tersampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah diijlud lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Tersampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



IRA WIRAWATI PURBA
1715100389

Disahkan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Desa Bandar Setia”. Latar belakang penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Desa Bandar Setia dengan rumusan masalah apakah Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian tujuan penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan pendekatan asosiatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan hasil pengolahan, diketahui pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, secara parsial Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan Pengawas Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Hasil uji Determinasi bahwa besarnya R Square sebesar 0,619 menunjukkan bahwa variabel Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal cukup mampu menjelaskan variabel keputusan pembelian sebesar 61,9% sedangkan sebesar 38,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

Kata Kunci : Akuntansi Sektor Publik, Pengawas Internal, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRACT

This thesis entitled "The Effect of Public Sector Accounting and Internal Supervisors on the Performance Accountability of Government Agencies in Bandar Setia Village." the problem of whether Public Sector Accounting and Internal Supervisors have a positive and significant effect partially on the Accountability of Performance of Government Agencies and Public Sector Accounting and Internal Supervisors have a positive and significant effect simultaneously on the Accountability of Performance of Government Agencies. Then the purpose of this study aims to find the influence of Public Sector Accounting and Internal Supervisors on the Performance Accountability of Government Agencies. The research approach used is descriptive method with data collection techniques using a questionnaire, with an associative approach with the sampling technique using purposive sampling. Based on the results of processing, it is known that the influence of Public Sector Accounting and Internal Supervisors has a significant effect simultaneously on the Performance Accountability of Government Agencies, partially Public Sector Accounting has a significant and positive effect on the Performance Accountability of Government Agencies while Internal Supervisors have no significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies. The result of the Determination test shows that the R Square is 0.619, indicating that the Public Sector Accounting and Internal Supervisory variables are sufficiently able to explain the purchasing decision variable by 61.9%, while 38.1% is explained by other variables not examined in this study.

Keywords: *Public Sector Accounting, Internal Supervisors, Performance Accountability of Government Agencies*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan proposal skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul proposal skripsi “Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia Deli Serdang”. Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak menerima bimbingan nasihat dan bantuan dari berbagai pihak, maka dengan penuh keikhlasan mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E.,MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr.Onny Medaline, S.H.,M.Kn, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr Rahima BR.Purba, S.E., M.Si,Ak,CA, selaku Pembimbing 1 saya yang telah sabar dan dengan cermat memberikan bimbingan dan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini Serta Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Suwarno, S.E., MM, selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis dibangku kuliah sampai dengan selesai.

6. Pegawai Instansi Desa Bandar Setia, yang telah memberikan waktunya dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis.
7. Kedua orang tua saya Marojahan Purba dan Mama Norma Siallagan dan seluruh keluarga saya tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Teman – teman pendidikan Akuntansi,teman-teman sepermainan, teman tapi mesra yang telah selalu mendukung dan memberikan motivasi atau bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Untuk Rio syaputra sinaga terima kasih atas waktunya yang membantu saya ngeriset data ke lokasi.
10. Untuk kakak Sartika Purba dan Adek Hendro Purba terima kasih uda mau bantu secara material dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis mendoakan semoga Tuhan memberkati skripsi ini hingga dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan khususnya untuk penulis sendiri. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan tugas skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, April 2021

Penulis

Ira Wirawati Purba

NPM : 1715100389

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	9
1.2.1 Batasan Masalah	9
1.2.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Masalah	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	11
1.4 Keaslian Penelitian	11

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Agensi dalam Pemerintahan	13
2.1.2 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	14
2.1.2.1 Jenis – jenis Akuntansi Publik	16
2.1.2.2 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik	17
2.1.2.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik	20
2.1.2.4 Tujuan Akuntansi Sektor Publik	21
2.1.2.5 Indikator Akuntansi Publik	23
2.1.2.6 Elemen – elemen Akuntansi Sektor Publik	24
2.1.2.7 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta ..	26
2.1.3 Pengawas Internal	27
2.1.3.1 Pengertian Pengawas	30
2.1.3.2 Jenis – jenis Pengawas	30
2.1.3.3 Pengertian Pengawas Internal	32
2.1.3.4 Fungsi dan Tugas Pengawas Internal	32

2.1.3.5	Indikator Pengawas Internal	34
2.1.3.6	Unsur – unsur Pengawas Internal	35
2.1.4	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	38
2.1.4.1	Tipe Akuntabilitas	39
2.1.4.2	Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi.....	40
2.1.4.3	Tujuan Akuntabilitas Kinerja Instansi	41
2.2	Penelitian Terdahulu	41
2.3	Kerangka Konseptual	46
2.4	Hipotesis	47

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Pendekatan Penelitian	49
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	49
3.2.1	Lokasi Penelitian	49
3.2.2	Waktu Penelitian	50
3.3	Populasi dan Sampel / Jenis Dan Sumber Data	51
3.3.1	Populasi dan Sampel.....	52
3.3.2	Jenis Data dan Sumber Data	52
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	52
3.4.1	Variabel Penelitian	53
3.4.2	Definisi Operasional	53
3.5	Teknik Pengumpulan Data	55
3.6	Teknik Analisis Data	56
3.6.1	Uji Kualitas Data	61
3.6.1.1	Uji Validitas.....	61
3.6.1.2	Uji Reliabilitas.....	61
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	56
3.6.2.1	Uji Normalitas	57
3.6.2.2	Uji Multikolinearitas.....	57
3.6.2.3	Uji Heteroskedastisitas	58
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	58

3.6.4	Hipotesis.....	59
3.6.4.1	Uji T (Parsial).....	59
3.6.4.2	Uji F (Simultan).....	60
3.6.3.3	Koefisien Determinasi (R ²).....	60

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	60
4.1.1	Geografis Desa Bandar Setia.....	60
4.1.2	Jumlah Penduduk.....	60
4.1.3	Data Pendidikan.....	63
4.1.4	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bandar Setia	64
4.1.5	Penyajian Data	69
4.1.6	Deskriptif Karakteristik Responden	70
4.1.7	Deskriptif Karakteristik Variabel Penelitian	74
4.1.8	Pengujian dan Analisis Data.....	91
4.1.8.1	Uji Validitas	91
4.1.8.2	Uji Realiabilitas	94
4.1.9	Analisis Statistik Deskriptif	95
4.1.10	Teknik Analisis Data	98
4.1.10.1	Uji Normalitas	98
4.1.10.2	Uji Multikolineritas	101
4.1.10.2	Uji Heteroskedastisitas	102
4.1.11	Analisis Regresi Linear Berganda	103
4.1.12	Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness Of Fit</i>)	104
4.1.12.1	Uji Signifikan Simultan (f)	104
4.1.12.2	Uji Signifikan Parsial (t)	105
4.1.12.3	Uji Signifikan Koefisien Determinasi (R ²)	107
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	108
4.2.1	Pengaruh Akuntansi sektor publik terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah	108
4.2.2	Pengaruh Pengawas internal terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah	109

4.2.3 Pengaruh Akuntansi sektor publik dan Pengawas internal terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah	109
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	111
5.1 Saran	112

DAFTAR PUSTAKA	113
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	50
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia	6
Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta	31
Tabel 2.2 Daftar Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.2 Skedul Proses Penelitian.....	38
Tabel 3.3 Operasional Variabel Penelitian	39
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Suku Kepala Keluarga	60
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat (di Dusun I s/d X).....	63
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Jenis kelamin	70
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Usia.....	70
Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Pendidikan	71
Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Agama	72
Tabel 4.8 Responden Berdasarkan Bagian	72
Tabel 4.9 Hasil Jawaban Responden Tentang X1.1	73
Tabel 4.10 Hasil Jawaban Responden Tentang X1.2	74
Tabel 4.11 Hasil Jawaban Responden Tentang X1.3	74
Tabel 4.12 Hasil Jawaban Responden Tentang X1.4	75
Tabel 4.13 Hasil Jawaban Responden Tentang X1.5	76
Tabel 4.14 Hasil Jawaban Responden Tentang X1.6	76
Tabel 4.15 Hasil Jawaban Responden Tentang X1.7	77
Tabel 4.16 Hasil Jawaban Responden Tentang X2.1	78
Tabel 4.17 Hasil Jawaban Responden Tentang X2.2	79
Tabel 4.18 Hasil Jawaban Responden Tentang X2.3	79
Tabel 4.19 Hasil Jawaban Responden Tentang X2.4	80
Tabel 4.20 Hasil Jawaban Responden Tentang X2.5	81
Tabel 4.21 Hasil Jawaban Responden Tentang X2.6	81

Tabel 4.22	Hasil Jawaban Responden Tentang X2.7	82
Tabel 4.23	Hasil Jawaban Responden Tentang X2.8.....	83
Tabel 4.24	Hasil Jawaban Responden Tentang X2.9.....	83
Tabel 4.25	Hasil Jawaban Responden Tentang Y1	84
Tabel 4.26	Hasil Jawaban Responden Tentang Y2	85
Tabel 4.27	Hasil Jawaban Responden Tentang Y3	85
Tabel 4.28	Hasil Jawaban Responden Tentang Y4	86
Tabel 4.29	Hasil Jawaban Responden Tentang Y5	87
Tabel 4.30	Hasil Jawaban Responden Tentang Y6	87
Tabel 4.31	Hasil Jawaban Responden Tentang Y7	88
Tabel 4.32	Hasil Jawaban Responden Tentang Y8	89
Tabel 4.33	Hasil Jawaban Responden Tentang Y9	89
Tabel 4.34	Hasil Jawaban Responden Tentang Y10	90
Tabel 4.35	Hasil Jawaban Responden Tentang Y11	91
Tabel 4.36	Hasil Uji Validitas X1	92
Tabel 4.37	Hasil Uji Validitas X2	92
Tabel 4.38	Hasil Uji Validitas Y	93
Tabel 4.39	Hasil Uji Reliabilitas X1	94
Tabel 4.40	Hasil Uji Reliabilitas X2	94
Tabel 4.41	Hasil Uji Reliabilitas Y	95
Tabel 4.42	Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif X1	96
Tabel 4.43	Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif X2	97
Tabel 4.44	Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Y	97
Tabel 4.45	Hasil Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogrov Smirnov Test</i>	101
Tabel 4.46	Hasil Uji Multikolinearitas	102
Tabel 4.47	Hasil Regresi Linear Berganda	103
Tabel 4.48	Hasil Uji Simultan (f)	104
Tabel 4.49	Hasil Uji Parsial (t)	105
Tabel 4.50	Hasil Uji Koefisien Determinasi	105

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Instansi Desa Bandar Setia	65
Gambar 4.2	Histogram Uji Normalitas	99
Gambar 4.3	Plot Uji Normalitas	100
Gambar 4.4	Scatterplot Uji Heteroskedastitas	102

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian instansi Desa Bandar Setia	115
Lampiran 2 Tabulasi Data	120
Lampiran 3 Deskripsi Karakteristik Responden	121
Lampiran 4 Deskripsi Karakteristik Variabel Penelitian	123
Lampiran 5 Uji Validitas Data	132
Lampiran 6 Uji Realiabilitas.....	133
Lampiran 7 Analisis Statistik Deskriptif	134
Lampiran 8 Uji Normalitas	135
Lampiran 9 Uji Multikolinearitas	137
Lampiran 10 Uji Heteroskedastisitas	137
Lampiran 11 Analisis Regresi Linear Berganda.....	138
Lampiran 12 Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	138
Lampiran 13 Uji Signifikan Parsial (Uji T).....	138
Lampiran 14 Koefisien Determinas	139

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berlakunya era baru otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia berkembang pesat. Salah satunya melalui rumusan Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yaitu Ketetapan MPR XV / MPR / 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang berkeadilan, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Indonesia yang menyeimbangkan landasan hukum pusat dan daerah. undang-undang pengundangan fiskal Negara kesatuan republik. Keputusan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan; Keputusan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32) (Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) Sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah upaya yang bertujuan untuk memberdayakan daerah agar dapat mengambil keputusan daerah dengan lebih leluasa berdasarkan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah dalam mengelola sumber dayanya. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik karena mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab dalam rangka pengelolaan dana melalui sistem desentralisasi secara transparan, efektif, efektif dan bertanggung jawab.

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolah dan masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan dapertemen-dapertemen dibawahnya seperti , pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014). Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan akuntansi pada sektor publik sendiri memiliki wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan sektor swasta. Peranan sektor publik ini memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Haryanto, (2017) menyatakan, jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subjek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akuntansi. Pada pembahasan sektor publik dianggap kuarang efisien dikarenakan praktik manajemnya perlu dilakukan perbaikan akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, dan pembangunan dan sistem pemeriksaan serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan- kebijakan yang dilakukan pemerintah agar bisa mendapat kualitas yang baik bagi masyarakat.

Peraturan Mentri Dalam Negri Repblik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelolah keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah.

- b. Bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi pemerintah daerah kabupaten / kota.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan akuntabilitas pada sektor publik sangat penting guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah pada organisasi BUMN. Pada tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya “politisasi” atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan “sapi perah” oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development dari pada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktek akuntansi sektor publik di Indonesia belum sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini disebabkan kurangnya ketaatan dan kepedulian dalam penerapan sistem akuntansi keuangan yang

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi inipun terjadi juga di instansi pemerintah daerah.

Hasil kerja suatu instansi pemerintah adalah melaksanakan urusan pemerintahan sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, yang dapat dilihat melalui informasi tentang sistem pertanggungjawaban kinerja masing-masing instansi pemerintah. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan sebagai dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik lagi. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggung jawaban sebagai penyelenggara pemerintah Pada Desa Bandar Setia Kabupaten Deli Serdang kepada masyarakat.

Pengaturan mengenai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah atau SAKIP berdasarkan peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014 meliputi : rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja serta laporan pemerintahan pusat. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kebijakan strategis di Indonesia saat ini, karena peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan berdampak pada upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi instansi.

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak penelitian ekstensif dibidang ekonomi dan politik. Dibidang ekonomi, perbaiki

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim berinvestasi sambil meningkatkan akuntabilitas kinerja sektor publik instansi pemerintah akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat hingga pemerintah. Kondisi ini menunjukkan harus ada laporan keuangan pusat dan daerah dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan bertanggung jawab. Adanya laporan keuangan tersebut menjadikannya sebagai sumber informasi menentukan dan mengadopsi pengembangan kebijakan dan perluas wilayahnya.

Di Indonesia, konsep akuntabilitas bukanlah hal baru. Hampir semua instansi pemerintah menekankan sistem akuntabilitas ini, terutama dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Fenomena ini merupakan hasil dari kebutuhan masyarakat yang mulai bergema di awal era reformasi tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan - penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia. Era reformasi membawa harapan baru bagi implementasi sistem akuntabilitas di Indonesia. Selain itu, banyaknya permintaan dari negara donor dan pemberi hibah mendukung kondisi ini yang memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk memperbaiki birokrasi untuk mencapai *good governance*. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah, belum ada yang menjelaskan secara detail sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang dapat dijadikan acuan atau standar untuk laporan kinerja dan pemeriksaan

kinerja. Dengan tidak adanya standar yang dapat dijadikan acuan, masyarakat masih kesulitan dalam menilai sukses tidaknya kinerja pemerintah.

Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal menetapkan bahwa pemerintah daerah diperlukan pengendalian internal administrasi pemerintah daerah. Pengendalian internal adalah untuk mendukung dan memperkuat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Pengendalian internal dibedakan sifat pengawasan akuntansi dan administrasi.

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini tertuang dalam ketetapan Standar Audit – Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (SA-SAFP) tahun 1996 oleh BPKP dengan keputusan Kepala BPKP No.Kep-378/K/1996.SA-APFP secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan penerapan sistem pengawasan yang jelas, tepat, dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari KKN. Dengan pengawasan tersebut diharapkan dapat diperoleh masukan bagi pengambil keputusan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi.

Pengawasan internal merupakan fungsi manajemen yang penting dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah. Dapat diketahui pengendalian internal instansi pemerintah telah menjalankan tugas secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan peraturan yang ditetapkan. Kecuali pengawasan semacam ini manajemen internal pemerintah yang membutuhkan dorongan dalam mewujudkan pemerintah yang baik, pemerintahan yang bersih dan pemerintahan efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan internal dilakukan oleh pemerintah provinsi / kabupaten / kota untuk kepentingan gubernur / bupati / walikota / sedang memantau kinerja unit organisasi dibawah kepemimpinannya.

Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan tersebut, maka perlu adanya pengawasan untuk memperkecil timbulnya penyimpangan tersebut. pengawasan internal berarti penyalagunaan aparatur negara dalam memberantas adanya unsur *fraud* (kecurangan) dan penyelewengan.

Pada saat sekarang ini, pentingnya akuntabilitas semakin diperlukan seiring dengan proses globalisasi yang menuntut pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam peningkatan kinerja serta pelayanan publik. Seiring meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap

sektor pelayanan publik, maka diharapkan pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah kepada masyarakat harus semakin memuaskan (*service excellence*).

Untuk menghadapi keadaan tersebut perlu memperhatikan faktor-faktor yang memperkuat efektivitas pertanggung jawaban kinerja atas wewenang, yang mempengaruhi akuntabilitas secara efisien dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Serta yang harus dilakukan adalah meningkatkan sikap profesionalisme agar memiliki keunggulan kompetitif dan memiliki prinsip dalam memberikan pelayanan yang sesuai tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Dari segi aspek governance dapat ditinjau apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dalam mewujudkan tujuan dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas.

Permasalahan yang ada disekitar akuntabilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah, tidak saja dalam tataran peraturan perundangan yang mengaturnya, namun juga dari mekanisme, metode dan informasi yang perlu diungkapkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Nasional terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2001 dan tahun 2002 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), didapati bahwa tingkat kepatuhan instansi dalam mengimplementasikan Lakip sampai dengan akhir periode Desember 2002 masih rendah.

Bagi para pengawas keuangan Negara, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangan tersebut adalah ketidak mampuan pihak pengawas dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui

opini yang diberikannya. Kemampuan pihak pengawas tentunya diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan Negara. Guna mewujudkan *program good governance*, profesionalisme auditor merupakan tonggak utama dalam berkinerja. Bukti merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap remeh dalam sebuah temuan pada setiap pemeriksaan. Tuntutan auditor bukan lagi sebanyak-banyak temuan dan sebanyak-banyak kerugian yang harus dikembalikan ke kas negara, tetapi profesionalisme sangat diutamakan”. Oleh sebab itu sikap profesionalisme internal auditor sudah menjadi tuntutan jaman, sebab hanya yang bersikap dan berpandangan profesional yang akan memberikan kontribusi yang besar baik bagi organisasi maupun individu.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/128/AA.05/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, Pemerintah Desa Bandar Setia Kabupaten Deli Serdang mendapat nilai 70,01, dengan rincian penilaian seperti pada tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1
Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia
Kabupaten Deli Serdang 2018-2019

No	Komponen yang dinilai	Nilai			Keterangan
		Bobot	2018	2019	
1	Perencanaan kinerja	30	23,33	22,91	-0,42
2	Pengukuran kinerja	25	16,46	18,31	1,85
3	Evaluasi kinerja	15	11,06	12,84	1,78
4	Capaian kinerja	10	6,68	8,11	1,43
5	Pelaporan kinerja	20	12,48	12,90	0,42
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,01	75,07	5,06
	Tingkat Akuntabilitas kinerja		BB	BB	-

Sumber : Pemerintah Desa Bandar Setia deli serdang, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Desa Bandar Setia Kabupaten Deli Serdang secara umum mengalami peningkatan. Namun, salah satu komponen penilaian pada aspek perencanaan kinerja menurun. Selain itu juga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari level Organisasi Perangkat Daerah hingga indikator kinerja Pegawai , penyesuaian kinerja (*cascade down*) ditingkatkan.
2. Mengkaji komponen rencana, kegiatan dan anggaran dengan mengacu pada perbaikan sasaran. Hasil kajian harus memastikan bahwa anggaran hanya dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan strategis dan memilih program / kegiatan yang mendukung tujuan tersebut.
3. Secara teratur meningkatkan kualitas pengukuran output dan hasil untuk memastikan bahwa tujuan kinerja organisasi tercapai.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelaksanaan manajemen kinerja, sebagai sarana monitoring dan evaluasi rutin oleh pimpinan, guna mencapai efektivitas rencana kinerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi..
5. Meningkatkan penyajian informasi laporan kinerja OPD untuk menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas rencana, dan efisiensi anggaran.
6. Menginstruksikan Inspektorat untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja OPD sehingga tercapai konsensus antara OPD dan antara Bappeda dengan pejabat program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efektivitas tujuan dan anggaran Efisiensi penggunaan.

7. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi pimpinan OPD dalam pelaksanaan manajemen kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
8. Gunakan informasi tentang kinerja dan kinerja organisasi sebagai dasar untuk penghargaan dan hukuman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pengawasan internal di Pemerintah Desa Bandar Setia Deli Serdang dilakukan oleh Inspektorat Desa Bandar Setia yang merupakan aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Desa Bandar setia Deli Serdang. Fungsi inspektur adalah mengawasi seluruh kegiatan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia Deli Serdang”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Konsep akuntabilitas sektor publik belum mampu diterapkan secara konsisten, hal ini disebabkan kurangnya ketaatan dan kepedulian dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Masih terdapat kelemahan dan ketidak mampuan pihak pengendalian internal dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya.
3. Masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu masih terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

1.2.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya tentang pengaruh penerapan sektor publik dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Instansi yang menjadi objek penelitian adalah instansi pemerintahan Desa Bandar Setia Deli Serdang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Teori Agensi Dalam Pemerintahan

Menurut (Faristina, 2011) Teori Agensi merupakan Hubungannya dengan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya. Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik .Teori keagenan akan terjadi di berbagai organisasi, termasuk organisasi pemerintah, dan fokus pada manajer (lembaga/ Pemerintah) dan masyarakat.tanggung jawab publik dapat diartikan sebagai kewajiban para pihak wali (agen) memberikan akuntabilitas, laporan dan ungkapan semua aktivitas dan tanggung jawab kepada klien yang memiliki hak kekuatan untuk menuntut akuntabilitas (Mardiasmo, 2010).

Mengenai masalah keagenan, praktik pelaporan keuangan organisasi sektor publik didasarkan pada konsep teori keagenan. Laporan keuangan sektor publik, pemerintah bertindak sebagai agen kewajiban untuk memberikan informasi yang berguna kepada keuangan pemerintah bertanggung jawab untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial atau politik.suatu tata kelola yang demokratis, hubungan antara pemerintah dapat diktakan sebagai hubungan keagenan (*agency relationship*).

Teori keagenan memperlakukan pemerintah daerah sebagai agen masyarakat (*principal*) dan akan bertindak penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* mengasumsikan bahwa banyak informasi yang terjadi antara agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap pihak informasi masyarakat. Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and *balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry*.

Menurut teori keagenan, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan pengelolaan yang dilakukan sepenuhnya sesuai dengan berbagai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan peningkatan akuntabilitas informasi daerah dan masyarakat menjadi lebih seimbang artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Ketika *information asymmetry* menurun kemungkinan untuk melakukan korupsi akan kecil.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Haryanto (2017), akuntansi sektor publik adalah memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dari akuntansi sektor swasta. Akuntansi sektor publik bersifat melayani atau non profit sedangkan akuntansi pada sektor swasta lebih mengutamakan profit atau keuntungan. Bastian (2014) mengemukakan bahwa,

akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya seperti, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Menurut pemikiran Nordiawan (2010) akuntansi sektor publik adalah Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Menurut (Biduri 2018) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018) bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti, pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan dan menghemat pengeluaran semua pihak yang membutuhkan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah Mekanisme teknis dan analisis akuntansi. Yaitu proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara

dan departemen-departemen di bawahnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.2.1 Jenis – jenis Akuntansi Sektor Publik

Organisasi-organisasi sektor publik sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, cenderung masyarakat berurusan dengan instansi pemerintah, seperti kantor pencatatan sipil, departemen pendidikan, kantor pajak, departemen tenaga kerja atau kepolisian. Tambahan Selain itu juga masyarakat berinteraksi dengan berbagai organisasi keagamaan, seperti Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), dan lain-lain. Dibidang pendidikan dan kesehatan, terdapat banyak organisasi sektor publik seperti, universitas, sekolah-sekolah, rumah sakit dan puskesmas, yang juga mencakup organisasi sektor publik merupakan partai politik dan organisasi non pemerintah diberbagai bidang.

(Biduri 2018) menyatakan bahwa jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu, sebagai berikut:

a. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian dari organisasi yang berupa lembaga sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah pusat meliputi : (1) Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain. (2) Lembaga dan Badan Negara seperti KPK, KPU.

2) Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan pengelolaan asset daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain.

b. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi miliknya pemerintah. Contohnya (a) Perguruan Tinggi BHMN; (b) Rumah Sakit Milik Pemerintah seperti RSCM dan ; (c) Yayasan-yasan Milik Pemerintah. Pada perkembangannya, sebagian oraganisasi kelompok ini di kategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

c. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya: (a) Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompot Dhuafa Republika, dan lain-lain; (b) Sekolah dan universitas swasta; dan (c) Rumah sakit milik swasta.

2.1.2.2 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Selama lebih dari 50 Tahun, peran organisasi sektor publik seperti pemerintahan dan upaya yang dilakukan terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara. Oleh karena itu, membatasi akuntan sektor publik untuk membahas pemerintahan yang akan menciptakan kevakuman dalam pengawasan

praktik akuntansi sektor publik yang tentunya harus dilakukan. Salah satu hal terpenting adalah mencapai konsensus tentang ruang lingkup akuntansi sektor publik.

Menurut Bastian (2010) Ruang Lingkup Akuntansi sektor publik adalah Lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai perkembangan pemikiran yang terjadi. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi nirlaba publik lainnya. Jadi, proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik. Di sisi lain, globalisasi juga telah memengaruhi sikap masyarakat terhadap pemerintah dan infrastruktur operasional pemerintahan. Contohnya adalah kesadaran untuk meningkatkan pelayanan publik (seperti telekomunikasi dan kelistrikan).

Setelah memahami pembahasan di atas, selanjutnya mari fokus pada ruang lingkup akuntansi sektor publik sebagai inti dari sub topik ini. Perlu diketahui bahwa lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan berbagai perkembangan pemikiran yang ada. Secara spesifik, di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, serta organisasi-organisasi publik nonprofit. Secara otomatis, proses pelaporan dan akuntabilitas publik diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik.

Akuntansi Sektor Publik mempunyai empat pilar utama Eriana (2010), empat pilar itu adalah:

1) Manajemen

dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. jadi, sektor publik merupakan bidang yang membicarakan metode manajemen negara. Bidang manajemen merupakan bidang akuntansi sektor publik yang mengupas akuntansi dari sisi internal organisasi.

2) Informasi

beberapa literatur menyebutkan bahwa pengertian akuntansi tidak hanya sekedar melakukan pembukuan pencatatan transaksi saja, tetapi juga merupakan wahana pelayanan jasa yang berfungsi mempersiapkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan bidang akuntansi difokuskan pada pelaporan ke pemakai eksternal organisasi sektor publik.

3) Pembelanjaan

pemerintahan sebagai salah satu organisasi sektor publik mempunyai pengaruh besar pada kebijakan kegiatan bisnis yang dijalankan organisasi seperti menilai syarat infrastruktur fisik dan sosial, kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, kebijakan industri, dan lain sebagainya.

4) Audit

organisasi audit sektor publik adalah organisasi sektor publik yang mempunyai rincian tugas untuk melakukan pemeriksaan praktek keuangan dan kepatuhan hukum/prosedur dari berbagai organisasi sektor publik. bidang

audit merupakan bidang yang dikembangkan sebagai prasarana pengawasan. di sektor publik bidang audit lebih ditujukan untuk mengembangkan alat verifikasi dan pengawasan.

2.1.2.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus menguntungkan. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dari akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi disebabkan oleh perbedaan lingkungan yang mempengaruhi akuntansi. Menurut (Biduri 2018), faktor lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:

Faktor ekonomi meliputi antara lain :

- a) Pertumbuhan ekonomi
- b) Tingkat inflasi
- c) Tenaga kerja
- d) Nilai tukar mata uang
- e) Infrastruktur
- f) Pertumbuhan pendapatan perkapita

1) Faktor politik meliputi :

- a) Hubungan negara dan masyarakat
- b) Legitimasi Pemerintah
- c) Tipe rezim yang berkuasa
- d) Ideology Negara

- e) Elit dan politik massa
 - f) Jaringan internasional
 - g) Kelembagaan
- 2) Faktor kultural meliputi antara lain :
- a) Keragaman suku, ras agama, bahasa dan budaya
 - b) Sistem nilai di masyarakat
 - c) Historis
 - d) Sosiologi masyarakat
 - e) Karakteristik masyarakat
 - f) Tingkat pendidikan
- 3) Faktor demografi meliputi anatar lain :
- a) Pertumbuhan penduduk
 - b) Struktur usia penduduk
 - c) Migrasi
 - d) Tingkat kesehatan

2.1.1.4 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Lembaga sektor publik masih banyak memiliki banyak peluang untuk meningkatkan kinerja dan menggunakan sumber daya. Kinerja sektor publik sebenarnya ini bukan hanya masalah teknis, tetapi akuntansi sektor publik adalah alat yang sangat penting. Akuntansi sektor publik akan terus berkembang dalam meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas publik di lembaga – lembaga sektor publik.

Menurut American Accounting Association (2009) tujuan akuntansi organisasi sektor publik sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola operasi dan alokasi sumber daya organisasi yang relevan dengan benar, efisien dan ekonomis. Tujuan ini terkait dengan pengawasan manajemen (*management pengawasan*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif, serta penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*Accountability*).

Menurut Nordiawan (2010) akuntansi pemerintahan memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Tujuan pertanggungjawaban

Untuk mencapai akuntabilitas pemerintah, pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang lengkap dalam bentuk dan waktu yang benar, serta memberikan informasi keuangan yang akurat.

- 2) Tujuan manajerial

Untuk tujuan manajemen, memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja

pemerintah adalah tujuan yang diharapkan akuntansi pemerintah untuk dicapai.

3) Tujuan pengawasan

Untuk memberikan informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawas.

Berdasarkan tujuan akuntansi sektor publik yang disebutkan di atas, ini adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk manajemen operasi yang tepat, efektif dan ekonomis, serta alokasi sumber daya yang dialokasikan untuk organisasi, dan untuk memberikan tanggung jawab informasi yang memungkinkan manajer untuk melaporkan tentang implementasi, dan mengelolanya dengan tepat dan tepat..

2.1.2.5 Indikator Akuntansi Publik

Berikut ini adalah siklus akuntansi keuangan sektor publik. Menurut Bastian (2014) siklus akuntansi keuangan sektor publik sebagai berikut :

- a) Transaksi, persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya dilaporkan dalam laporan keuangan.
- b) Analisis transaksi membuktikan bahwa transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang aktifitas transaksi. Berdasarkan bukti tersebut akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

- c) Pencatatan data transaksi yang merupakan analisis bukti transaksi, yang mencatat bukti transaksi yang telah terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.
- d) Pengikhtisaran, ada daftar nama grup akun yang ada di organisasi di buku besar. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan transaksi akan dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Ini disebut *posting*
- e) Pelaporan, selama satu periode akuntansi, laporkan catatan transaksi dan kelompokkan ke dalam buku besar di masa mendatang. Berdasarkan catatan tersebut, siapkan laporan keuangan dan serahkan kepada pihak-pihak yang terlibat. Kemudian menganalisis laporan keuangan sektor publik yang telah disiapkan untuk menilai keakuratan dan keandalannya

2.1.2.6 Elemen – elemen Akuntansi Sektor Publik

Elemen akuntansi sektor publik merupakan bagian wajib dalam pengelolaan pengelolaan keuangan publik. Bagian-bagian tersebut merupakan Elemen akuntansi sektor publik menurut Indra Bastian (2010) adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan Publik

Aspek yang termasuk dalam rencana adalah menggunakan sumber daya yang ada untuk menetapkan tujuan dan mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

2) Penganggaran Publik

Anggaran memberikan rencana yang rinci atas pendapatan dan pengeluaran organisasi sehingga pengeluaran dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

3) Realisasi Anggaran Publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah di rencanakan dan ditetapkan dalam bentuk program kegiatan yang nyata. Yang dimana yang dimaksud kita harus focus dalam pelaksanaan anggaran yang tertuju pada organisasi pada operasional dalam bentuk program yang telah ditetapkan. Dan begitu juga, realisasi anggaran akan menunjukkan pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah *input* menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses tersebut sangat terkait erat dengan kualitas keluaran. Realisasi anggaran terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program.

4) Penggandaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, metode dan tindakan penyediaan produk dan jasa kepada publik atau publik

5) Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan, kemajuan pencapaian target pendapatan, kemajuan pencapaian bagi hasil dan pembiayaan.

6) Audit Sektor Publik

Dapat diketahui auditing atau pemeriksaan adalah investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanismenya adalah dapat menggerakkan makna akuntabilitas dalam peneglolahan sektor pemerintah. Badan usaha milik Negara (BUMN), instansi pengelola asset Negara lainnya,

ataupun organisasi publik non pemerintah, seperti partai politik, LSM, Yayasan dan organisasi di tempat peribadatan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengungkapkan pendapat yang jujur atas laporan keuangan, hasil operasi, kinerja dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi. sehingga. Laporan auditor merupakan media untuk mengungkapkan pendapat auditor atau dalam kondisi tertentu.

7) Pertanggungjawaban Publik

Pertanggungjawaban publik adalah proses atau tindakan yang diambil oleh penanggung jawab organisasi sektor publik saat menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas mandatnya.

2.1.2.7 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta

Mardiasmo (2010) mengemukakan perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Perbedaan	Sektor publik	Sektor swasta
Tujuan organisasi	<i>Nonprofit motive</i>	<i>Profit motive</i>
Sumber pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan asset negara.	Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal : utang bank obligasi, penerbitan saham.

Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD).	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur organisasi	Birokratis, kaku dan hierarkis.	Fleksibel: datar, pyramid, lintas fungsional.
Karakteristik anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi	<i>Cash accounting</i>	<i>Accrual accounting</i>

Sumber : Mardiasno (2010)

2.1.3 Pengawasan Internal

2.1.3.1 Pengertian Pengawasan

Menurut (Yahya 2016) Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dan manajemen. Hal ini berkaitan dengan cara pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. Hal ini berkaitan dengan cara pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. Definisi ini menunjukkan hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan.

Menurut Bastian (2010) Pengawasan merupakan salah satu unsur manajemen di samping *planning, organizing, actuating, coordinating, directing*, dan lain-lain. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang berkesinambungan, tujuannya untuk mengamati, memahami dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga kesalahan atau penyimpangan dapat dicegah atau diperbaiki.

Menurut (Siagian 2013) bahwa pengawasan adalah suatu proses observasi, bukan pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi, untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018) pengawasan adalah tindakan membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi atau memastikan bahwa tujuan tertentu tercapai dengan sebaik-baiknya.

2.1.3.2 Jenis – jenis Pengawasan

Menurut Bastian (2010) jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan objek, ruang lingkup dan metode pengawasannya sebagai berikut :

1. Pengawasan Berdasarkan Objeknya

Pengawasan berdasarkan objeknya dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Pengawasan Terhadap Penerimaan Negara

Pengawasan penerimaan Negara dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu pengawasan terhadap penerimaan pajak dan bea cukai, serta pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak. Bila pengawasan terhadap penerimaan pajak dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak dan pengawasan terhadap penerimaan bea cukai dilakukan oleh Kantor Inspeksi Bea Cukai, maka pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak dilakukan oleh KPKN (Komite Penyelamat Kekayaan Negara). Pengawasan yang dilakukan oleh Inspeksi Pajak ditujukan baik kepada wajib pajak perorangan maupun pada wajib pajak badan yang ditunjuk

oleh Undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut pajak orang lain.

b) Pengawasan Terhadap Pengeluaran Negara

Merupakan suatu kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan – penerimaan negara, dan pengeluaran – pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan didalam anggaran.

2. Pengawasan Menurut Sifatnya

a) Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelumnya terjadinya penegeluaran keuangan.

b) Pengawasan Detektif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen – dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara.

3. Pengawasan Menurut Ruang Lingkup

a) Pengawasan Internal

Fungsi pengawasan internal ini diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektur Jendral (IRJEN), Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten (Itwildakap) dan Inspektorat Wilayah Daerah Kota Madya (Itwildako).

b) Pengawasan Eksternal

Suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawas yang sama sekali berasal lingkungan organisasi eksekutif. Di

Indonesia pengawasan eksternal ini diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan secara langsung oleh masyarakat.

4. Pengawasan Menurut Metode Pengawasannya

a) Pengawasan Melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau unit kerja terhadap program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan berlaku.

b) Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun dari eksternal pemerintah.

2.1.3.3 Pengertian Pengawasan Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No.Pernyataan No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengendalian intern adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap tanggung jawab dan fungsi organisasi, sehingga dapat sepenuhnya dilaksanakan. memastikan bahwa kegiatan telah terlaksana, dilaksanakan pada tahun 2009. Secara efektif untuk mewujudkan kepentingan pimpinan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk tercapainya efektifitas dan

efisiensi kegiatan, keandalan laporan keuangan (realisasi anggaran di sektor pemerintahan), serta ketaatan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Halim (2011) pengendalian internal merupakan suatu sistem atau alat yang menjamin keberhasilan dalam tujuan kinerja suatu kegiatan.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakantindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal kontrol (Simbolon,2013).

Menurut Swayer (2010), pengendalian internal adalah jenis pengawasan yang mencakup rencana organisasi dan semua metode dan koordinasi yang digunakan di perusahaan untuk memastikan keamanan aset, memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Kebijakan manajemen.

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan internal merupakan kegiatan yang bertujuan mengawasi kegiatan-kegiatan

pemerintah mulai dari program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku atau yang ditentukan.

2.1.3.4 Fungsi dan Tugas Pengawasan Internal

Fungsi pengawasan dalam membantu manajemen meliputi mencakup tiga hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja organisasi.
2. Memberikan opini atas kinerja organisasi.
3. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah pencapaian kinerja yang ada.

Fungsi ini dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen secara cepat dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggara, baik secara internal maupun eksternal.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 47 Tahun 2011 Pasal 4 tentang Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional bahwasannya fungsi Pengawasan Internal adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan kebijakan dan program
- 2) Penyusunan Program Pengawasan
- 3) Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang milik negara
- 4) Pendampingan dan review laporan keuangan
- 5) Pemberian saran dan rekomendasi

- 6) Penyusunan laporan pengawasan
- 7) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah mengevaluasi kebijakan dan setiap prosedur masing – masing dapertemen dalam menjalankan tugas masing – masing , untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah memadai dan dilaksanakan secara efektif dan memeriksa apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya, melakukan penelitian apakah kegiatan tersebut dilakukan secara efektif.

Menurut Ketentuan Nomor 47 Pasal 3 Tahun 2011 Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, bahwasannya tugas dapertemen Pengawasan Internal adalah Satuan Pengawasan Internal mempunyai Tugas dapertemen pengawas internal melaksanakan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja. Tugas dan tanggungjawab dapertemen pengawas internal sebagai berikut:

- a) Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan
- b) Memastikan atau mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal
- c) Melakukan evaluasi dan validitasi terhadap sistem

Kesimpulan dari suatu pengawasan internal adalah berupa laporan yang ditujukan kepada pimpinan organisasi. Bagian pengendalian internal dari laporan merupakan alat komunikasi, yang tujuannya mulai dari alokasi, ruang lingkup pemeriksaan, batasan pelaksanaan, dan rekomendasi kepada pimpinan organisasi. Di

samping itu laporan menjadi penting karena dapat dijadikan referensi berharga mengenai pekerjaan pemeriksaan untuk pemeriksaan selanjutnya di masa yang akan datang.

Temuan audit yang disampaikan dengan baik dalam laporan pengawasan internal akan memberitahukan manajemen mengenai kelemahan dalam pengendalian intern yang bila dibiarkan dapat menimbulkan terjadinya kecurangan yang merugikan perusahaan. Selain itu rekomendasi yang disampaikan pengawasan internal akan membantu manajemen dalam mengambil tindakan-tindakan perbaikan sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) dan kesalahan bisa diperkecil.

2.1.3.5 Indikator Pengawasan Internal

Swayer's (2010) menyebutkan beberapa sarana operasional yang dapat digunakan manager untuk mengontrol fungsi di dalam perusahaan adalah:

1) Organisasi (*organization*)

organisasi sebagai sarana kontrol, merupakan struktur peran yang dituju untuk orang-orang di dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan ekonomis.

2) Kebijakan (*policy*)

suatu kebijakan adalah pernyataan prinsip yang diperlukan untuk memandu atau membatasi tindakan.

3) Prosedur (*procedure*)

merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

4) Personalia (*personnel*), Orang yang dipekerjakan atau ditugaskan harus memiliki kualifikasi untuk melakukan tugas yang diberikan. Pengawasan adalah cara yang baik untuk mengontrol selain kinerja semua orang. Oleh karena itu, standar pemantauan harus ditetapkan.

5) Akuntansi (*accounting*) merupakan cara yang sangat penting untuk pengendalian keuangan atas aktivitas dan sumber daya.

6) Penganggaran (*budgeting*) Merupakan suatu deskripsi hasil yang diharapkan dalam bentuk digital. Sebagai kontrol, anggaran menetapkan standar masukan sumber daya dan keluaran yang harus dicapai.

7) Pelaporan, Sebagian besar organisasi memiliki fungsi manajemen dan dapat mengambil keputusan berdasarkan laporan yang diterima. Oleh karena itu, laporan harus tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis.

2.1.3.6 Unsur-unsur Pengawasan Internal

Menurut Gondodiyoto (2010), unsur-unsur sistem pengawasan internal sangat penting karena sistem memiliki banyak unsur dan karakteristik tertentu dapat meningkatkan kepercayaan data akuntansi pengamanan untuk aset dan catatan perusahaan. Setiap elemen terkait langsung dengan tujuan pengawasan internal dan langkah-langkah yang dapat diambil perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut.

Unsur terpenting dari sistem pengawasan internal adalah penerapannya, yaitu karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya. Orang yang bekerja jujur dan efisien

selalu bekerja dengan sepenuh hati, walaupun hanya didukung oleh sedikit unsur pengawasan lainnya, padahall kelima unsur pengawasan lain tersebut begitu *powerfull*. Tetapi orang yang tidak berkompeten dan tidak jujur dapat dengan mudah mengacaukan sistem.

Menurut Gondodiyoto (2010) model (*framework*) COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) terdiri lima kelompok (unsur-unsur) yang saling berhubungan yang akan menunjang pencapaian tujuan pemerintahan sebagai berikut:

1. *Kontrol environment* (lingkungan pengawasan)
2. *Risk Assisment* (penaksiran risiko)
3. *Kontrol Activities* (aktivitas Pengawasan)
4. *Information dan Communication* (informasi dan komunikasi)
5. *Memonitoring* (pemantauan)

Lima komponen Model COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) kontrol internal Menurut Swayer (2010) sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengawasan

bagian ini mencakup sikap manajemen di semua tingkatan terhadap keseluruhan operasi, terutama konsep pengawasan. Hal ini mencakup : Etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi. Ini juga mencakup struktur organisasi, serta kebijakan dan konsep manajemen.

2. Penentuan Risiko

Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal yang terus berkembang. Penentuan risiko meliputi penentuan risiko seluruh aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui penilaian risiko. COSO juga telah meningkatkan pertimbangan tujuan di semua area operasi untuk memastikan koordinasi di antara berbagai departemen dalam organisasi.

3. Aktivitas Pengawasan

komponen ini mencakup aktivitas yang sebelumnya terkait dengan konsep pengawasan internal. Kegiatan tersebut meliputi persetujuan, tanggungjawab, dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal. Risiko aktivitas terhadap seluruh organisasi harus dinilai.

4. Informasi dan Komunikasi

Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. tanpa informasi, manajemen tidak berfungsi . Pertukaran informasi tentang operasi pengawasan internal memberikan esensi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan dan operasi manajemen.

5. Pemantauan

Merupakan evaluasi yang dinamis dan wajar dari informasi yang disediakan dalam komunikasi informasi untuk tujuan pengawasan dan manajemen.

2.1.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah sebabnya mengapa akuntabilitas menggambarkan keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Surat Keputusan (SK) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: “Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencerminkan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berhasil tidaknya tujuan yang ditetapkan oleh sistem akuntabilitas reguler untuk mencapai misi organisasi”.

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan) (LAN & BPKP, 2000) sistem akuntabilitas kinerja adalah memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan perilaku individu / badan hukum / kewajiban pemimpin organisasi. Pihak yang organisasi memiliki hak untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban.. Berdasarkan pengertian yang dijelaskan semua instansi pemerintah, bagian dan lembaga Negara daerah maupun pusat sesuai dengan tugas masing- masing harus memahami lingkup Akuntabilitasnya, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Ledvina (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada

pada jalur otoritasnya maupun sudah berada jauh di luar tanggung jawab dan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dan pimpinan seluruh staf instansi pemerintah, perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

Harus jujur, obyektif, transparan dan positif, dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknologi pengukuran kinerja dan mempersiapkan akuntabilitas, untuk mendorong perubahan dalam manajemen instansi pemerintah.

2.1.4.1 Tipe Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe. Menurut Rosjidi (2011) tipe dan jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- a. Akuntabilitas internal, yaitu setiap pejabat atau pengurus public baik individu maupun kelompok dalam kelompok di dalam lingkungan internal

pemerintahan yang secara hirarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan secara baik mengenai perkembangan kinerja.

- b. Akuntabilitas eksternal, yaitu setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk komunikasi kepada pihak eksternal dan lingkungan.

2.1.4.2 Indikator-indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam menyusun sebuah evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, harus mengikuti pada indikator-indikator yang ditetapkan. Indikator kinerja menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang memberi gambaran yang mengenai tingkat pencapaian kinerja dalam suatu sasaran atau tanggungjawab yang telah ditetapkan menurut Santoso (2010) sebagai berikut :

1. Indikator masukan atau input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan output. Contoh: dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
2. Indikator output adalah sesuatu yang diharapkan untuk mencapai suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsi keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung.
4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang timbul baik, bersifat positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

2.1.4.3 Tujuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Instruksi Presiden (Impres) Republik Indonesia Nomor.7 Tahun 1999 disebutkan bahwa: “ Tujuan dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik”. Maka berdasarkan impress tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Bambang (2012)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	<p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. 2. Pengawasan 3. kualitas laporan keuangan dan implikasinya. <p>Variabel Devenden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan. 2. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah baik secara parsial maupun simultan.
2	Dina Afrina (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah. 2. pengendalian intern. 3. Sistem Pelaporan. <p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.

				<p>Semakin baik sistem akuntansi yang diterapkan maka akan semakin baik juga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.</p> <p>2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.</p> <p>3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.</p>
3	Netty Herawaty (2011)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi	<p>Variabel independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan Sasaran Anggaran . 2. Pengendalian Akuntansi. 3. Sistem Pelaporan <p>Variabel Dependen :</p>	<p>1. Pengaruh parsial mempunyai pengaruh positif dan negatif. Variabel yang mempunyai pengaruh negatif yaitu variabel X1 (Kejelasan sasaran anggaran) dan X2</p>

			1. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	(Pengendalian akuntansi). 2. Variabel yang mempunyai pengaruh positif yaitu variabel variabel sistem pelaporan (X3) 3. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 66,4%.
4	Ahmad Rudi Yulianto, Osmad Muthaher (2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah KabupatenPati	Variabel independen: 1.kejelasan sasaran anggaran. 2.pengendalian akuntansi 3.sistem pelaporan. Variabel dependen : 1.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan efektivitas pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sumber : penulis, 2021

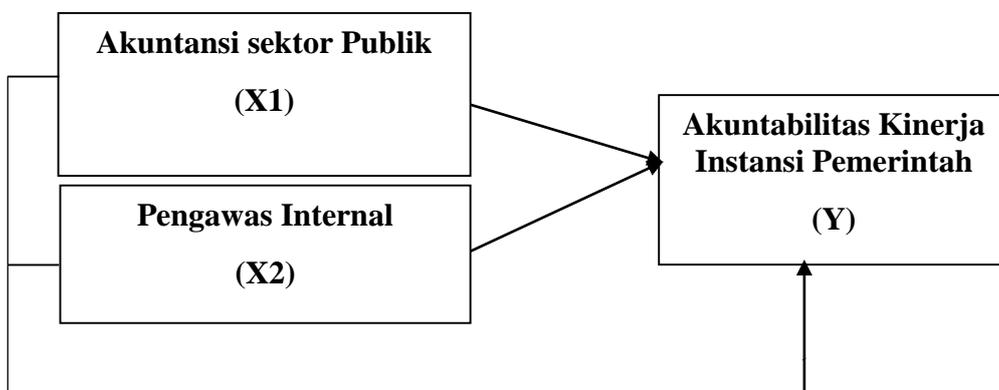
2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kumpulan konsep dari fenomena yang diteliti sehingga maknanya masih sangat abstrak dan dapat dimaknai secara subjektif dan dapat menimbulkan ambiguitas (Suliyanto 2018). Kerangka konseptual memberikan gambaran bagaimana secara teoritis hubungan antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Kerangka konseptual adalah suatu uraian atau visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang dilakukan (Notoadmodjo, 2012).

Pada penelitian ini variabel independen adalah penerapan akuntansi publik dan pengawasan internal, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber: Oleh Peneliti (2021)

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis bias dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual diatas, maka peneliti mengemukakan hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H₁ :Akuntansi Sektor Publik berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia Deli Serdang.

H₂ : Pengawasan Internal berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia Deli Serdang.

H₃ : Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Berpengaruh secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia Deli Serdang.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan Asosiatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan mengetahui hubungan yang signifikan antara variabel penelitian dan menarik kesimpulan yang akan memperjelas gambaran objek penelitian.

Pengertian metode deskriptif menurut (Sugiyono, 2014) metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang dikumpulkan, dan tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi secara umum.

1.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.2.1 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Pemerintah Desa Bandar Setia Deli Serdang yang terletak di jalan terusan dusun 5 desa bandar setia Kabupaten Deli Serdang.

1.2.2 Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan selesai, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No	Kegiatan	2021																							
		Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																						
2.	Penyusunan proposal			■	■	■	■	■	■																
3.	Bimbingan									■	■	■	■												
4.	Seminar Proposal													■											
5.	Bimbingan														■										
6.	Pengelolaan Data															■	■								
7.	Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■				
8.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■

Sumber : Penulis 2021

1.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

1.3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai instansi pemerintah Desa Bandar Setia Deli Serdang yang beberapa bagian berjumlah 30 orang.

Menurut Sugiyono (2018) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan dalam

penelitian ini adalah *non probability sampling*, adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, *aksidental*, *puprosive*, jenuh dan snowball (Sugiyono, 2018). Teknik *non probability* sampling yang dipilih adalah *purposive sampling*. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Berdasarkan penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan judul yang diambil penulis yaitu akuntansi sektor publik terhadap kinerja, maka yang menjadi sampel sasaran dalam penelitian ini adalah pegawai yang ditempatkan di bagian Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan, Sekretaris, Kaur Pelayanan, Kaur Umum, Kaur Kesra, Sekretarid Desa, Kepala Desa. Kaur Pembangunan.

Tabel 3.2
Penentuan Sampel

No	Nama Pegawai	Bagian
1.	Khairul azwar	Kaur Pemerintahan
2.	Syamsul bahri	Kaur Pemerintahan
3.	Syahputra Nasution	Kaur Pemerintahan
4.	Lasa siregar	Kaur Pemerintahan
5.	Sugianto	Kepala Desa
6.	Agustian	Kaur Keuangan
7.	Kusno Ar	Kaur Keuangan
8.	Marsono siregar	Kaur Pelayanan
9.	Sudiono	Kaur Pelayanan

10.	Linda Hutapea	Kaur Pelayanan
11.	Nancy	Kaur Pelayanan
12.	Asnar lisna	Kaur Pelayanan
13.	Ayu winanda	Kaur Umum
14.	Dendy	Kaur Umum
15.	Agus Purnomo	Kaur Umum
16.	Daniel suwanto	Kaur Umum
17.	Ismail siregar	Kaur Kesra
18.	Mia handriyani	Kaur Kesra
19.	Alfandi Batubara	Kaur Kesra
20.	Amran	Kaur Kesra
21.	Siti Harahap	Kaur Kesra
22.	Rahma	Kaur Pembangunan
23.	Dwiyanto Nst	Kaur Pembangunan
24.	Sugiono	Kaur Pembangunan
25.	Mahyiddin	BPD
26.	Galih	BPD
27.	Suwanto	BPD
28.	Suyanti	BPD
29.	Vina wati	Sekretaris Desa
30.	Deliayana	Sekretaris Desa

Sumber : Desa bandar setia

1.3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data penelitian deskriptif dan Asosiatif, yaitu data yang dinyatakan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan. Dan sumber data yang diperoleh adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara) yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010). Penelitian ini data menggunakan variabel akuntansi sektor publik, pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diperoleh langsung dari pegawai pada Desa Bandar Setia Deli Serdang.

1.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

Menurut Sugiyono (2016) variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel dependen (terikat). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah Akuntansi Sektor Publik, dan Pengawas Internal.

Menurut Sugiyono (2016) variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi.

3.4.2 Definisi Operasional

Menurut Suliyanto (2018) definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. Dengan kata lain, operasionalisasi variabel adalah mendefinisikan variabel yang bersifat konsep menjadi spesifik (tidak bermakna ganda) dan terukur.

Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 yang telah disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Akuntansi Sektor Publik (X_1)	Mekanisme teknis dan analisis akuntansi melaksanakan pengelolaan dana publik di lembaga dan dapertemen tingkat tinggi negara, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, LSM, dan yayasan sosial, dan proyek kerja sama dapertemen publik dan swasta (Bastian, 2014).	1. Analisis bukti transaksi. 2. Pencatatan data transaksi. 3. Pengikhtisaran. 4. Pelaporan	Interval
Pengawasan Internal (X_2)	Pengawas mencakup rencana organisasi dan semua metode yang terkordinasi dan berlaku untuk perusahaan yang mengamankan aset, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, optimis dan mendorong	1. organisasi. 2. kebijakan 3. prosedur 4. penganggaran	Interval

	ketaatan kebijakan manajemen yang dikembangkan (Swayer, 2010)		
Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y)	Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono 2010).	1. Ekonomis (cermat dalam penggunaan dan alokasi sumber daya) 2. Efisiensi (Penggunaan sumber daya) 3. Efektivitas (Pencapaian tujuan)	Interval

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hartono (2017) beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik atau pendekatan metode memperoleh data mentah dengan cara mengamati secara langsung objek data. Metode lain yang dapat digunakan untuk memperoleh data mentah adalah metode komunikasi (*communication approach*).

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara intersep, dan wawancara telepon.

3. Eksperimen

Studi yang melibatkan keterlibatan peneliti memanipulasi beberapa variabel, mengamati dan mengobservasi efeknya.

4. Survei

Metode pengumpulan data primer untuk menanyai individu yang diwawancarai. Investigasi dapat dibagi menjadi investigasi surat, investigasi yang disediakan komputer.

5. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data metode pengumpulan data yang menggunakan angket untuk menjawab daftar pertanyaan yang akan dijawab dengan menggunakan angket.

6. Dokumentasi

Dokumentasi, dari menurut asal katanya dokumen memiliki pengertian barang-barang tertulis. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dapat berupa penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Kuesisioner atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada konsumen/orang lain yang kita jadikan sebagai responden.

1.6 Teknik Analisis Data

1.6.1 Uji Kualitas Data

Sebelum data dianalisis dan dievaluasi, terlebih dahulu data tersebut diuji dengan:

1.6.1.1 Uji Validitas

Validitas menurut Sugiyono (2016) bertujuan mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid dengan alat ukur yang telah disediakan (kuesioner). Valid artinya data yang diperoleh melalui kuesioner dapat menjawab tujuan penelitian berdasarkan jumlah n (sampel/responden). Pada derajat kebebasannya r_{tabel} ($df = n - k$) harus lebih dari ($>$) 0,30. Pengujian validitas dengan menggunakan program SPSS.

1.6.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan menunjukkan konsistensi didalam mengukur gejala yang sama. Menurut (Situmorang dan Lutfi,2012) Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setelah pernyataan dikatakan valid dalam uji validitas, maka akan ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut :
Jika $r_{alpha} > r_{tabel}$ maka pernyataan dikatakan reliabel, jika $r_{alpha} < r_{tabel}$ maka pernyataan dinyatakan tidak reliabel. Pengujian dilakukan dngan software SPSS. Suatu konstruk dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

1.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi dengan analisis regresi linier berganda berbasis *ordinary least squares* (OLS). Uji hipotesis klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas (Agus dan Prawoto, 2016).

1.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah secara visual yaitu melalui normal P-P Plot, ketentuannya adalah jika titik-titik masih berada di sekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar normal. Jika nilai sig lebih dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Agus dan Prawoto, 2016).

1.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan antara variabel bebas (X) dalam model regresi berganda. Jika hubungan linear antara variabel bebas dalam model regresi berganda memiliki korelasi sempurna maka variabel-variabel tersebut berkolinieritas. Multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai varians inflation factors (VIF). Apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel independen, dan jika VIF > 10 maka terdapat multikolinieritas diantara variabel independen (Agus dan Prawoto, 2016).

1.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute dengan variabel-variabel independen. Jika data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0 dan tidak membentuk suatu pola maka tidak terdapat heteroskedastisitas, namun apabila membentuk pola secara teratur maka terdapat heteroskedastisitas (Agus dan Prawoto, 2016).

1.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Muhidin dan Maman (2017) mengemukakan bahwa analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama pola hubungan pelacakan untuk mengetahui bagaimana perubahan beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam fenomena kompleks. Jika X_1, X_2, \dots, X_i adalah variabel-variabel independen dan Y adalah variabel dependen, maka terdapat hubungan fungsional antara X dan Y , di mana variasi dari X akan diiringi pula oleh variasi dari Y .

Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana. Kegunaannya, yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebasnya (X) dua atau lebih. Persamaan regresi ganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

a = Konstanta

b = Koefisien

X_1 = Akuntansi Sektor Publik

X_2 = Pengawasan Internal

e = error

1.6.4 Pengujian Hipotesis

1.6.4.1 Uji T (Uji Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, apakah bermakna atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung masing-masing variabel bebas dengan nilai ttabel dengan derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai thitung \geq ttabel, maka variabel bebas dalam penelitian memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat (Agus dan Prawoto, 2016).

1.6.4.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel pada derajat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila Fhitung \geq Ftabel maka secara serentak variabel bebas memiliki pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat (Agus dan Prawoto, 2016).

1.6.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat, dengan $0 < R^2 < 1$. Apabila R^2 semakin kecil maka kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat akan terbatas, sedangkan jika R^2 semakin besar dan mendekati 1 maka kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat semakin baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Geografis Desa Bandar Setia

Desa Bandar Setia, merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan dan terletak di wilayah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Secara singkat dapat diuraikan letak geografis desa Bandar Setia sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Saintis dan Desa Kolam
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bandar Klippa
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandar Khalipah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sampali/ Lau Dendang

Secara topografi Desa Laut Dendang ini merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian ± 30 meter di atas permukaan laut. Orbitasi :

- a. Jarak ke ibukota kecamatan : 8 km
- b. Jarak ke ibukota kabupaten : 30 km
- c. Jarak ke ibukota provinsi : 12 km
- d. Luas areal yang digunakan untuk Pertanian : 10 Ha dan Pemukiman : 90 Ha

4.1.2 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah kekayaan bangsa sekaligus modal dasar pembangunan. Hal ini dapat terjadi jika jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai

kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak diperdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana akan menjadi beban pembangunan itu sendiri. Desa Bandar setia merupakan desa pemukiman yang padat penduduk yang jumlah penduduknya berjumlah 18716 jiwa, yang terdiri dari berbagai suku meliputi suku Jawa, Batak, Melayu, Padang, Mandailing, Aceh, Nias, Tionghoa, Sunda, Banten, Banjar, India, Karo, Bugis dan Ambon. Sebagian besar bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar setelah bahasa jawayang telah menjadi kesepakatan umum dan hal ini dilatarbelakangi juga oleh banyaknya masyarakat setempat yang bersuku Jawa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	RT	Penduduk		
			LK	PR	LK+PR
1	Dusun 1	381	836	854	1690
2	Dusun 2	773	1350	1778	3138
3	Dusun 3	530	1350	1788	2639
4	Dusun 4	233	336	761	1327
5	Dusun 5	426	936	1053	1989
6	Dusun 6	437	1063	928	1991
7	Dusun 7	213	303	229	602
8	Dusun 8	554	1083	1265	2340
9	Dusun 9	227	375	345	720

10	Dusun 10	431	1130	1133	2272
JUMLAH		4205	8942	9774	18716

Sumber Data di peroleh dari Pemerintah Desa Bandar Setia)

Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Suku Kepala Keluarga

No	Jenis Suku	Jumlah	%
1	Jawa	3227	73
2	Batak	308	7
3	Melayu	448	10
4	Padang	122	3
5	Mandailing	229	5
6	Aceh	13	0,2
7	Nias	6	0,1
8	Tionghoa	2	0,04
9	Sunda	6	0,1
10	Banten	10	1,4
11	Banjar	3	0,2
12	India	2	0,04
13	Karo	19	0,4
15	Bugis	4	0,0
15	Ambon	1	0,2
Total		4400	100

Sumber Data di peroleh dari Pemerintah Desa Bandar Setia)

4.1.3 Data Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk memajukan dan membangkitkan pengaruh tumbuh kembang suatu daerah. Peningkatan terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan amanat yang harus dilaksanakan bangsa yang sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang di ungkapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula dalam batang tumbuh UUD 1945 pasal 28 dan 31 yang di amanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, ketika pentingnya tanggung jawab pendidikan di sadari oleh individu, keluarga, masyarakat dan pemerintahan. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang di lakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan Internasional seperti pendidikan untuk semua (*education for All*), konvensi hak anak (*convention on the Rightof child*) dan Millenium Development Goals (MDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, kebodohan dan upaya meningkatkan taraf berfikir generasi unggul.

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat (di Dusun I s/d X)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	TK	363	1
2	SD / SEDERAJAT	4359	25
3	SMP/ SEDERAJAT	3631	22
4	SMA/ SEDERAJAT	5420	33

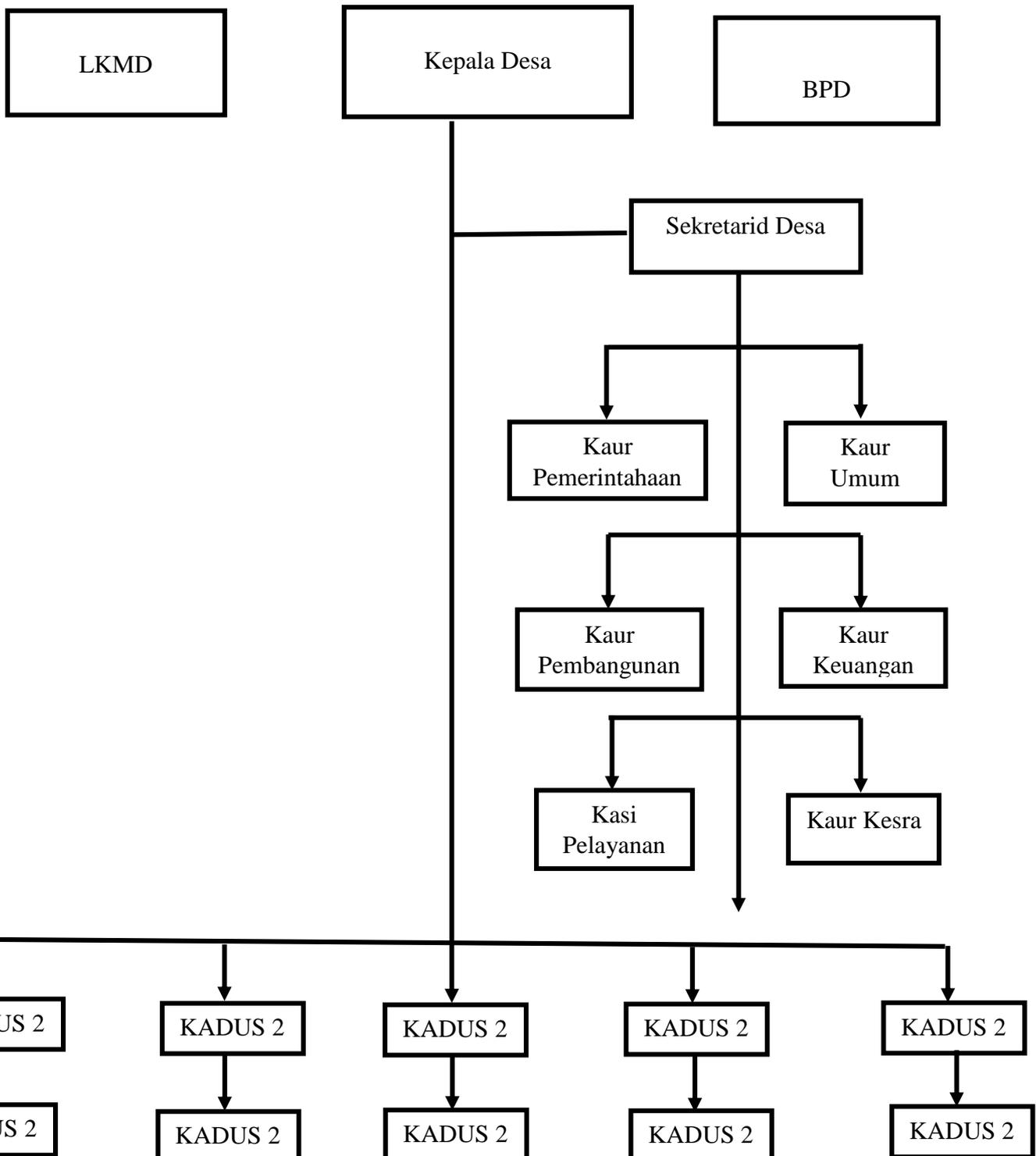
5	PERGURUAN TINGGI	1336	8
6	BELUM SEKOLAH	1362	8
7	TIDAK SEKOLAH	547	3
TOTAL		17018	100

Sumber Data di peroleh dari Pemerintah Desa Bandar Setia)

Jumlah tingkat pendidikan masyarakat di atas, merupakan jumlah tingkat pendidikan yang ada di Dusun II sampai Dusun X, dengan total penduduk 17.018 jiwa.

4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bandar Setia Deli Serdang

Umumnya setiap Instansi yang mempunyai struktur organisasi berbeda-beda satu dengan yang lainnya tergantung dari tujuan Instansi tersebut, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Namun pada hakekatnya mempunyai prinsip yang sama agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Struktur Organisasi dapat dikatakan sebagai hubungan kerja antara satu bagian dengan bagian lainnya agar semua kegiatan Instansi selesai pada waktunya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kepuasan baik terhadap kebijakan Instansi sebagai pengelola maupun tenaga kerja sebagai operasionalnya dalam melayani Masyarakat.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi
 Sumber : Instansi Desa Bandar setia

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Perangkat Desa

1. Kepala Desa

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa.
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- d. Menetapkan PPKD.
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL.
- f. Menyetujui RAK Desa.
- g. Menyetujui SPP

2. LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)

- a. Memelihara kerukunan hidup warga masyarakat.
- b. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
- c. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.

3. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

- a. Menggali, menampung, mengelolah dan menyalurkan aspirasi musyawarah desa.
- b. Membentuk panitia pemilihan kepala desa, dalam melakukan pemelihan kepalah desa.
- c. Memberi persetujuan pemberhentian sementara perangkat desa.
- d. Membuat susunan BPD.
- e. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

- f. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
- g. Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.

4. Sekretaris Desa

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa.
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa.
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa.
- e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD.
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

5. Kaur Pemerintahan

Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

6. Kaur Umum

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

7. Kaur Pembangunan

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

8. Kaur Keuangan

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

9. Kasi Pelayanan

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

10. Kaur Kesra (Kesejahteraan Masyarakat)

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

4.1.5 Penyajian Data

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai frekuensi dan persentase dari variabel Akuntansi Sektor Publik, Pengawas Internal, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan ke 30 responden, dimana responden yang menjawab kuesioner ini adalah para Pegawai Intansi Desa Bandar Setia Deli Serdang. Kuesioner berisikan 27 butir pernyataan yang terdiri dari 7 pernyataan untuk variabel bebas X1 (Akuntansi Sektor Publik), 9 pernyataan untuk variabel bebas X2 (Pengawas Internal) dan 11 butir pernyataan untuk variabel terikat Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan disediakan 5 alternatif jawaban yaitu:

Sangat setuju = 5

Setuju = 4

Netral = 3

Tidak Setuju = 2

Sangat Tidak Setuju = 1

Dalam menjawab permasalahan perlu kiranya diuraikan karakteristik sumber datanya, sehingga data yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan tersebut lebih akurat, untuk maksud tersebut maka penulis akan karakteristik responden berdasarkan hasil analisis kuesioner yang ada dilapangan.

4.1.6 Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini mencerminkan bagaimana keadaan responden yang diteliti meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, agama, bidang.

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki laki	13	43.3	43.3	43.3
Perempuan	17	56.7	56.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa yang mendominasi Pegawai Intansi Desa Bandar Setia yang menjadi responden berdasarkan Jenis Kelamin adalah berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 17 orang atau sebesar 36,7% dari total responden.

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-30 Tahun	6	20.0	20.0	20.0
31-40 Tahun	15	50.0	50.0	70.0
41-50 Tahun	9	30.0	30.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, menunjukkan bahwa yang mendominasi Pegawai Intansi Desa Bandar Setia yang menjadi responden berdasarkan usia adalah 31-40 thn yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 50,0 % dari total responden.

Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMU/SMK	4	13.3	13.3	13.3
	DIPLOMA	13	43.3	43.3	56.7
	SERJANA	12	40.0	40.0	96.7
	PASCA SERJANA	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa yang mendominasi Pegawai Intansi Desa Bandar Setia Deli Serdang yang menjadi responden berdasarkan pendidikan terakhir adalah Diploma, yaitu sebanyak 13 orang atau sebesar 43,3 % dari total responden.

Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Agama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ISLAM	23	76.7	76.7	76.7
	KRISTEN	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Pada tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa yang mendominasi Pegawai Intansi Desa Bandar Setia Deli Serdang yang menjadi responden berdasarkan agama adalah agama Islam, yaitu sebanyak 23 orang atau sebesar 76,7 % dari total responden.

Tabel 4.8 Responden Berdasarkan Bagian

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	KEPALA DESA	1	6.7	6.7	6.7
	KEPALA URUSAN KEUANGAN	2	6.7	6.7	13.3
	KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN	4	13.3	13.3	26.7
	KEPALA SEKSI PELAYANAN	4	13.3	13.3	40.0
	KEPALA URUSAN UMUM	4	10.0	10.0	50.0
	KEPALA URUSAN KESRA	5	16.7	16.7	66.7
	SEKRETARID DESA	3	10.0	10.0	76.7
	KAUR PEMBANGUNAN	3	10.0	10.0	86.7
	BPD	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Pada tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa yang mendominasi Pegawai Intansi Desa Bandar Setia Deli Serdang yang menjadi responden berdasarkan Bagian adalah Kepala Urusan Kesra , yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 16,7% dari total responden.

4.1.7 Deskripsi Karakteristik Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel bebas yaitu Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal dengan 1 (satu) variabel terikat yaitu Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 4.9 Responden Berdasarkan X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	12	40.0	40.0	40.0
Netral	1	3.3	3.3	43.3
Setuju	14	46.7	46.7	90.0
Sangat Setuju	3	10.0	10.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 orang (40,0%), netral 1 orang (3,3%), setuju 14 orang (46,7%), sangat setuju sebanyak 3 orang (10,0%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46,7%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap asset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 4.10 Responden Berdasarkan X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	12	40.0	40.0	40.0
	Setuju	17	56.7	56.7	96.7
	Sangat Setuju	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 orang (40,0%), setuju 17 orang (56,7%), sangat setuju 1 orang (3,3%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 17 orang (56,7%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu, yaitu kemandirian, entitas, adanya kesinambungan entitas.

Tabel 4.11 Responden Berdasarkan X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	1	3.3	3.3	3.3
	Tidak Setuju	9	30.0	30.0	33.3
	Netral	1	3.3	3.3	36.7
	Setuju	13	43.3	43.3	80.0
	Sangat Setuju	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 9 orang (30,0%), Netral 1 orang (3,3%), setuju 13 orang (43,3%), sangat setuju 6 orang (20,0%), dari jawaban responden paling

dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 13 orang (43,3%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal, dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan.

Tabel 4.12 Responden Berdasarkan X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	1	3.3	3.3	3.3
	Tidak Setuju	10	33.3	33.3	36.7
	Netral	2	6.7	6.7	43.3
	Setuju	13	43.3	43.3	86.7
	Sangat Setuju	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 10 orang (33,3%), Netral 2 orang (6,7%), setuju 13 orang (43,3%), sangat setuju 4 orang (13,3%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 13 orang (43,3%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan menggunakan prinsip - prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

Tabel 4.13 Responden Berdasarkan X1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	1	3.3	3.3	3.3
Tidak Setuju	19	63.3	63.3	66.7
Netral	2	6.7	6.7	73.3
Setuju	7	23.3	23.3	96.7
Sangat Setuju	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 9 orang (63,3%), Netral 2 orang (6,7%), setuju 7 orang (23,3%), sangat setuju 1 orang (3,3%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan tidak setuju sebanyak 19 orang (63,3%). Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa Setiap laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun keandalannya.

Tabel 4.14 Responden Berdasarkan X1.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	1	3.3	3.3	3.3
Tidak Setuju	11	36.7	36.7	40.0
Setuju	16	53.3	53.3	93.3
Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 11 orang (36,7%), setuju 16 orang (53,3%), sangat setuju 2 orang (6,7%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 16 orang (53,3%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur - unsur laporan keuangan, yaitu terbatas pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan catatannya dan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur - unsur laporan keuangan.

Tabel 4.15 Responden Berdasarkan X1.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	1	3.3	3.3	3.3
Tidak Setuju	12	40.0	40.0	43.3
Netral	3	10.0	10.0	53.3
Setuju	11	36.7	36.7	90.0
Sangat Setuju	3	10.0	10.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 12 orang (40,0%), netral 3 orang (10,0%), setuju 11 orang (36,7%), sangat setuju 3 orang (10,0%) dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 orang (40,0%). Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan - perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik.

Tabel 4.16 Responden Berdasarkan X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	15	50.0	50.0	50.0
Setuju	12	40.0	40.0	90.0
Sangat Setuju	3	10.0	10.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15 orang (50,0%), setuju 12 orang (40,0%), sangat setuju 3 orang (10,0%) dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15 orang (50,0%). Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa Terdapat struktur organisasi yang jelas menerangkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Tabel 4.17 Responden Berdasarkan X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	11	36.7	36.7	36.7
Netral	3	10.0	10.0	46.7
Setuju	14	46.7	46.7	93.3
Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan tidak setuju sebanyak 11 orang (36,7%), netral 3 orang (10,0%), setuju 14 orang (46,7%), sangat setuju 2 orang (6,7%) dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46,7%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Terdapat kebijakan prosedur yang jelas mengenai kepegawaian, pengembangan, penilaian prestasi dan kompensasi kepada pegawai.

Tabel 4.18 Responden Berdasarkan X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	13	43.3	43.3	43.3
	Netral	1	3.3	3.3	46.7
	Setuju	14	46.7	46.7	93.3
	Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan tidak setuju sebanyak 13 orang (43,3%), netral 1 orang (3,3%), setuju 14 orang (46,7%), sangat setuju 2 orang (6,7%) dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46,7%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Terdapat sanksi yang tegas atas pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Tabel 4.19 Responden Berdasarkan X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	3	10.0	10.0	10.0
Tidak Setuju	11	36.7	36.7	46.7
Netral	1	3.3	3.3	50.0
Setuju	15	50.0	50.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.19 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (10,0%), tidak setuju 11 orang (36,7%), netral 1 orang (3,3%) , setuju 15 orang (50,0%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang (50,0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Terdapat alur (*flow chart*) yang jelas untuk masing-masing jenis pekerjaan.

Tabel 4.20 Responden Berdasarkan Tabel 4.15 Responden Berdasarkan X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	10	33.3	33.3	33.3
Setuju	18	60.0	60.0	93.3
Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.20 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang (33,3%), setuju 18 orang (60,0%) , sangat setuju 2 orang (6,7%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 18 orang (60,0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Terdapat panduan/pedoman/SOP yang jelas untuk semua jenis pekerjaan.

Tabel 4.21 Responden Berdasarkan X2.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	1	3.3	3.3	3.3
Tidak Setuju	12	40.0	40.0	43.3
Netral	3	10.0	10.0	53.3
Setuju	14	46.7	46.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.21 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 12 orang (40,0%) , netral 3 orang (10,0%), setuju 14 orang (46,7%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46,7%). Jadi dapat disimpulkan responden tsetuju bahwa Menggunakan prosedur analitis dalam perencanaan dan review audit.

Tabel 4.22 Responden Berdasarkan X2.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	2	6.7	6.7	6.7
Tidak Setuju	11	36.7	36.7	43.3
Netral	2	6.7	6.7	50.0
Setuju	14	46.7	46.7	96.7
Sangat Setuju	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.22 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (6,7%), tidak setuju 11 orang (36,7%) , netral 2 orang (6,7%), setuju 14 orang (46,7%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46,7%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Menggunakan pertimbangan Sistem Pengendalian Internal dalam audit Laporan Keuangan.

Tabel 4.23 Responden Berdasarkan X2.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	2	6.7	6.7	6.7
Tidak Setuju	10	33.3	33.3	40.0
Netral	3	10.0	10.0	50.0
Setuju	15	50.0	50.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.23 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (6,7%), tidak setuju 10 orang (33,3%) , netral 3 orang (10,0%),

setuju 15 orang (50,0%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang (50,0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Terdapat kebijakan yang dipakai untuk memutuskan tindakan yang sesuai sebagai jawaban/tindak lanjut dalam menanggapi observasi dan saran yang telah dilaporkan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal).

Tabel 4.24 Responden Berdasarkan X2.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	3	10.0	10.0	10.0
	Tidak Setuju	14	46.7	46.7	56.7
	Setuju	10	33.3	33.3	90.0
	Sangat Setuju	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.24 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (10,0%), tidak setuju 14 orang (46,7%) , setuju 10 orang (33,3%), sangat setuju 3 orang (10,0%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14 orang (46,7%). Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa Terdapat prosedur yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan formulir atau dokumen pengelolaan keuangan.

Tabel 4.25 Responden Berdasarkan Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	9	30.0	30.0	30.0
	Setuju	18	60.0	60.0	90.0
	Sangat Setuju	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.25 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan tidak setuju sebanyak 9 orang (30,0%), setuju 18 orang (60,0%) , sangat setuju 3 orang (10,0%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju 18 orang (60,0%) Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategi organisasi.

Tabel 4.26 Responden Berdasarkan Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	14	46.7	46.7	46.7
	Netral	7	23.3	23.3	70.0
	Setuju	7	23.3	23.3	93.3
	Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.26 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14 orang (46,7%), netral 7 orang (23,3%) , setuju 7 orang (23,3%), sangat setuju 2 orang (6,7%) dari jawaban responden paling dominan adalah yang

menyatakan tidak setuju 14 orang (46,7%) Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa Membuat perencanaan strategis (renstra).

Tabel 4.27 Responden Berdasarkan Y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	14	46.7	46.7	46.7
Setuju	14	46.7	46.7	93.3
Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.27 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14 orang (46,7%), setuju 14 orang (46,7%) , sangat setuju 2 orang (6,7%) dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 14 orang (46,7%) dan setuju 14 orang (46,7%) , Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju dan setuju bahwa Mengembangkan berbagai indikator kinerja suatu program/kegiatan/proyek.

Tabel 4.28 Responden Berdasarkan Y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	2	6.7	6.7	6.7
Tidak Setuju	14	46.7	46.7	53.3
Setuju	11	36.7	36.7	90.0
Sangat Setuju	3	10.0	10.0	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.28 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (6,7%), tidak setuju 14 orang (46,7%) , setuju 11 orang (36,7%), sangat setuju 3 orang (10,0%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 14 orang (46,7%), Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa Pimpinan selalu menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil suatu program/kegiatan/proyek.

Tabel 4.29 Responden Berdasarkan Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	7	23.3	23.3	23.3
	Tidak Setuju	8	26.7	26.7	50.0
	Netral	2	6.7	6.7	56.7
	Setuju	11	36.7	36.7	93.3
	Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.29 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 7 orang (23,3%), tidak setuju 8 orang (26,7%) , netral 2 orang (6,7%), setuju 11 orang (36,7%), sangat setuju 2 orang (6,7%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan setuju 11 orang (36,7%), Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa Pimpinan dan staf mempertanggungjawabkan (*accountable*) hasil dari suatu program/kegiatan/proyek yang telah dilakukan.

Tabel 4.30 Responden Berdasarkan Y6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	1	3.3	3.3	3.3
Tidak Setuju	13	43.3	43.3	46.7
Netral	2	6.7	6.7	53.3
Setuju	12	40.0	40.0	93.3
Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.30 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 13 orang (43,3%) , netral 2 orang (6,7%), setuju 12 orang (40,0%), sangat setuju 2 orang (6,7%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 13 orang (43,3%), Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa Pimpinan dan staf selalu terlibat bersama - sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/kegiatan.

Tabel 4.31 Responden Berdasarkan Y7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	1	3.3	3.3	3.3
Tidak Setuju	15	50.0	50.0	53.3
Netral	1	3.3	3.3	56.7
Setuju	11	36.7	36.7	93.3
Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.31 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 orang (3,3%), tidak setuju 15 orang (50,0%) , netral 1 orang (3,3%), setuju

11 orang (36,7%), sangat setuju 2 orang (6,7%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 15 orang (50,0%), Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa Pimpinan selalu mengalokasikan sumber daya yang ada seperti dana, sumber daya manusia, dan waktu untuk digunakan dalam pengukuran kinerja.

Tabel 4.32 Responden Berdasarkan Y8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	2	6.7	6.7	6.7
	Tidak Setuju	14	46.7	46.7	53.3
	Netral	1	3.3	3.3	56.7
	Setuju	10	33.3	33.3	90.0
	Sangat Setuju	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.32 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (6,7%), tidak setuju 14 orang (46,7%) , netral 1 orang (3,3%), setuju 10 orang (33,3%), sangat setuju 3 orang (10,0%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 14 orang (46,7%), Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa Pegawai selalu menerima pengakuan positif atau perannya dalam pencapaian tujuan strategis organisasi.

Tabel 4.33 Responden Berdasarkan Y9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	3	10.0	10.0	10.0
	Tidak Setuju	15	50.0	50.0	60.0
	Netral	1	3.3	3.3	63.3
	Setuju	9	30.0	30.0	93.3
	Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.33 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (10,0%), tidak setuju 15 orang (50,0%) , netral 1 orang (3,3%), setuju 9 orang (30,0%), sangat setuju 2 orang (6,7%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 15 orang (50,0%), Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa Menghubungkan antara pencapaian kinerja suatu program/kegiatan/proyek dengan tujuan strategis organisasi.

Tabel 4.34 Responden Berdasarkan Y10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	5	16.7	16.7	16.7
	Tidak Setuju	16	53.3	53.3	70.0
	Netral	1	3.3	3.3	73.3
	Setuju	6	20.0	20.0	93.3
	Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.34 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 5 orang (16,7%), tidak setuju 16 orang (53,3%) , netral 1 orang (3,3%), setuju 6 orang (20,0%), sangat setuju 2 orang (6,7%), dari jawaban responden paling

dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 16 orang (53,3%), Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa Kurangnya intensif berupa imbalan atau pengakuan positif, tidak menghambat berbagai keputusan di organisasi.

Tabel 4.35 Responden Berdasarkan Y11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat tidak setuju	3	10.0	10.0	10.0
Tidak Setuju	16	53.3	53.3	63.3
Setuju	11	36.7	36.7	100.0
Total	30	100.0	100.0	

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.35 diatas menunjukkan bahwa yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 orang (10,0%), tidak setuju 16 orang (53,3%) , setuju 6 orang (20,0%), dari jawaban responden paling dominan adalah yang menyatakan tidak setuju 16 orang (53,3%), Jadi dapat disimpulkan responden tidak setuju bahwa Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

4.1.8 Pengujian dan Analisis Data

4.1.8.1 Uji Validitas

Validitas menurut Sugiyono (2016) bertujuan mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid dengan alat ukur yang telah disediakan (kuesioner). Valid artinya data yang diperoleh melalui kuesioner dapat menjawab tujuan penelitian berdasarkan jumlah n (sampel/responden). Pada derajat

kebebasannya r_{tabel} ($df = n - k$) harus lebih dari ($>$) 0,30. Pengujian validitas dengan menggunakan program SPSS.

Tabel 4.36 Uji Validitas Akuntansi Sektor Publik Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	18.93	23.306	.562	.809
X1.2	18.97	23.620	.581	.806
X1.3	18.73	21.375	.681	.788
X1.4	18.90	22.369	.612	.800
X1.5	19.60	25.421	.410	.830
X1.6	18.97	22.723	.607	.801
X1.7	19.10	22.921	.572	.807

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.36 diatas hasil *output* SPSS diketahui nilai Validitas terdapat pada kolom *Corrected Item- Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antar skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 7 (tujuh) butir pernyataan pada variabel Akuntansi Sektor Publik semuanya valid pernyataan X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 dapat dinyatakan valid karena CITC $>$ 0,3.

Tabel 4.37 Uji Validitas Pengawas Internal Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	24.67	41.402	.719	.874
X2.2	24.53	43.292	.661	.879
X2.3	24.60	40.041	.889	.861
X2.4	24.83	44.351	.511	.892
X2.5	24.37	42.033	.767	.871
X2.6	24.77	42.875	.715	.876
X2.7	24.73	43.444	.585	.885

X2.8	24.73	44.133	.576	.886
X2.9	24.90	43.472	.493	.895

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.37 diatas hasil *output* SPSS diketahui nilai Validitas terdapat pada kolom *Corrected Item- Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antar skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 9 (Sembilan) butir pernyataan pada variabel Pengawas Internal semuanya valid pernyataan X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 dapat dinyatakan valid karena CITC > 0,3.

Tabel 4.38 Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	28.50	52.397	.496	.819
Y2	29.10	55.403	.309	.833
Y3	28.87	51.844	.496	.819
Y4	29.03	48.861	.606	.808
Y5	29.23	48.875	.540	.815
Y6	28.97	47.895	.755	.796
Y7	29.07	51.926	.470	.821
Y8	29.07	50.202	.531	.816
Y9	29.27	48.409	.665	.803
Y10	29.53	54.120	.308	.835
Y11	29.37	53.620	.382	.828

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.38 diatas hasil *output* SPSS diketahui nilai Validitas terdapat pada kolom *Corrected Item- Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antar skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 9 (Sembilan) butir pernyataan pada variabel Pengawas Internal semuanya valid

pernyataan Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 dapat dinyatakan valid karena $CITC > 0,3$.

4.1.8.2 Uji Realiabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan menunjukkan konsistensi didalam mengukur gejala yang sama. Menurut (Situmorang dan Lutfi,2012) Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setelah pernyataan dikatakan valid dalam uji validitas, maka akan ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut : Jika $r_{\alpha} > r_{\text{tabel}}$ maka pernyataan dikatakan reliabel, jika $r_{\alpha} < r_{\text{tabel}}$ maka pernyataan dinyatakan tidak reliabel. Pengujian dilakukan dngan software SPSS. Suatu konstruk dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

Tabel 4.39 Uji Reliabilitas Variabel Akuntansi Sektor Publik (Reliability Statistics X1)

Cronbach's Alpha	N of Items
.830	7

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.39 diatas, hasil output SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,830 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 7 (tujuh) butir pernyataan pada variabel Akuntansi Sektor Publik adalah reliabel.

Tabel 4.40 Uji Reliabilitas Variabel Pengawas Internal (Reliability Statistics X2)

Cronbach's Alpha	N of Items
.892	9

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.40 diatas, hasil output SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,892 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 9 (sembilan) butir pernyataan pada variabel Pengawas Internal adalah reliabel.

Tabel 4.41 Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Reliability Statistics Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
.832	11

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Dari Tabel 4.41 diatas, hasil output SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,832 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 11 (sebelas) butir pernyataan pada variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah reliabel.

4.1.9 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum dan minimum. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase dari variabel Akuntansi Sektor Publik, Pengawas Internal, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 4.42 Statistik Deskriptif Akuntansi Sektor Publik (X1)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	30	2	5	3.27	1.112
X1.2	30	2	5	3.23	1.040
X1.3	30	1	5	3.47	1.224
X1.4	30	1	5	3.30	1.179
X1.5	30	1	5	2.60	1.003
X1.6	30	1	5	3.23	1.135
X1.7	30	1	5	3.10	1.155
Valid N (listwise)	30				

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Pada Tabel 4.42 diatas pada variabel Akuntansi Sektor publik (X1) rata-rata jawaban pegawai dari setiap item pernyataan memiliki jawaban setuju dengan rentang minimum 1 dan maksimum 5. Jawaban yang paling tinggi didominasi pada X1.3 dengan pernyataan Informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal, dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan, sedangkan jawaban paling rendah adalah pada X1.5 dengan pernyataan Setiap laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun keandalannya.

Tabel 4.43 Statistik Deskriptif Pengawas Internal (X2)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	30	2	5	3.10	1.155
X2.2	30	2	5	3.23	1.040
X2.3	30	2	5	3.17	1.085
X2.4	30	1	4	2.93	1.143
X2.5	30	2	5	3.40	1.037

X2.6	30	1	4	3.00	1.017
X2.7	30	1	5	3.03	1.129
X2.8	30	1	4	3.03	1.066
X2.9	30	1	5	2.87	1.279
Valid N (listwise)	30				

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Pada Tabel 4.43 diatas pada variabel Pengawas Internal (X2) rata-rata jawaban Pegawai dari setiap item pernyataan memiliki jawaban setuju dengan rentang minimum 2 dan maksimum 5. Jawaban yang paling tinggi didominasi pada X2.5 dengan pernyataan Terdapat panduan/pedoman/SOP yang jelas untuk semua jenis pekerjaan, sedangkan jawaban paling rendah adalah pada X2.9 dengan pernyataan Terdapat prosedur yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan formulir atau dokumen pengelolaan keuangan.

Tabel 4.44 Statistik Deskriptif Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y) Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1	30	2	5	3.50	1.042
Y2	30	2	5	2.90	.995
Y3	30	2	5	3.13	1.106
Y4	30	1	5	2.97	1.245
Y5	30	1	5	2.77	1.357
Y6	30	1	5	3.03	1.129
Y7	30	1	5	2.93	1.143
Y8	30	1	5	2.93	1.230
Y9	30	1	5	2.73	1.202
Y10	30	1	5	2.47	1.196
Y11	30	1	4	2.63	1.098
Valid N (listwise)	30				

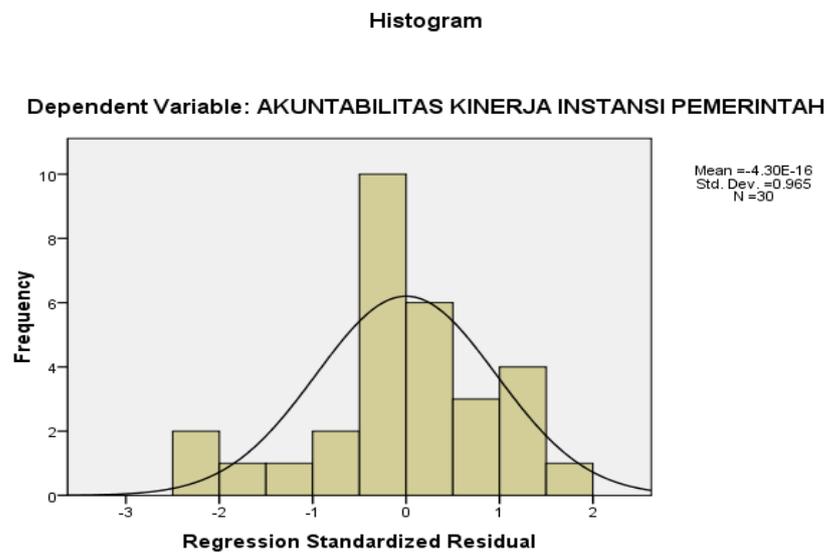
SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Pada Tabel 4.44 diatas pada variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y) rata-rata jawaban konsumen dari setiap item pernyataan memiliki jawaban setuju dengan rentang minimum 2 dan maksimum 5. Jawaban yang paling tinggi didominasi pada Y1 dengan pernyataan Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategi organisasi, sedangkan jawaban paling rendah adalah pada Y10 dengan pernyataan Kurangnya intensif berupa imbalan atau pengakuan positif, tidak menghambat berbagai keputusan di organisasi.

4.1.10 Teknik Analisa Data

4.1.10.1 Uji normalitas

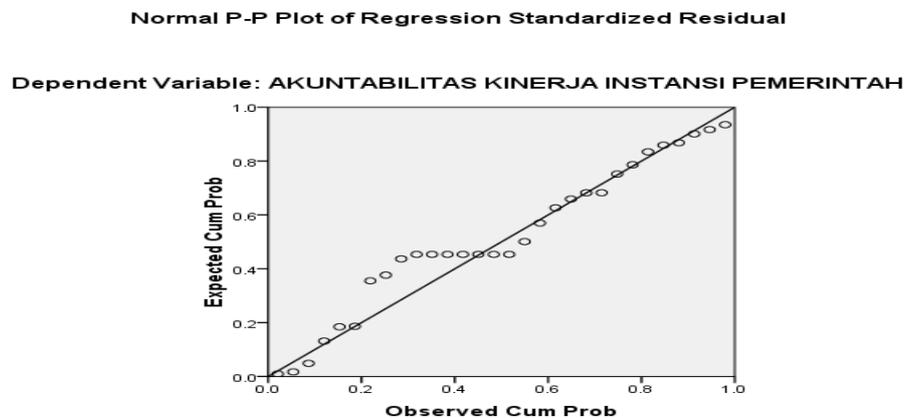
bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah secara visual yaitu melalui normal P-P Plot, ketentuannya adalah jika titik-titik masih berada di sekitar garis diagonal maka dapat dikatakan bahwa residual menyebar normal. Jika nilai sig lebih dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai sig lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Agus dan Prawoto, 2016).



Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat disimpulkan hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi normal, dimana gambar histogram terlihat garis melengkung membentuk lengkung simetris sehingga pengambilan keputusan uji normalitas menerima H_a dan menolak H_o . Artinya data pada penelitian ini berdistribusi secara normal.



Gambar 4.3 Plot Uji Normalitas

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas, terlihat pada pengujian P-P Plot terlihat titik-titik menyebar mendekati garis diagonal pada P-P Plot, sehingga pengambilan keputusan uji normalitas menerima H_a dan menolak H_o , artinya data pada penelitian ini berdistribusi secara normal.

Untuk lebih memastikan apakah data disepanjang garis diagonal tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogrov Smirnov (1 Sampel KS) yakni dengan melihat data residualnya apakah distribusi normal atau tidak. Jika nilai $Asym.sig (2-tailed) > taraf\ nyata (a = 0,05)$ maka data residual berdistribusi normal.

Tabel 4.45 Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.74816239
Most Extreme Differences	Absolute	.168
	Positive	.081
	Negative	-.168
Kolmogorov-Smirnov Z		.920
Asymp. Sig. (2-tailed)		.366

a..Test distribution is Normal.

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Pada Tabel 4.45 diatas, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data tersebut, besar nilai signifikan Kolmogrov Smirnov sebesar 0,64 maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 ($P = 0,64 > 0,05$).

4.1.10.2 Uji Multikolinearitas

Multikolineritas adalah adanya hubungan antara variabel bebas (X) dalam model regresi berganda. Jika hubungan linear antara variabel bebas dalam model regresi berganda memiliki korelasi sempurna maka variabel-variabel tersebut berkolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai varians inflation factors (VIF). Apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen, dan jika VIF >10 maka terdapat multikolinearitas diantara variabel independen (Agus dan Prawoto, 2016).

Tabel 4.46 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	.446	2.242
	PENGAWAS INTERNAL	.446	2.242

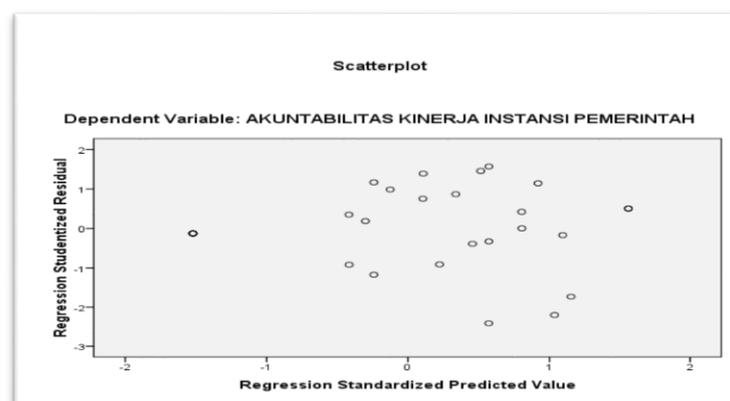
a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Berdasarkan Tabel 4.46 diatas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah Akuntansi Sektor Publik 2,242 < 10 dan Pengawas Internal 2,242, serta nilai *Tolerance* Akuntansi Sektor Publik $0,446 > 0,10$ dan Pengawas Internal $0,446 > 0,10$ artinya data pada penelitian ini tidak terjadi Multikolinearitas.

4.1.10.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain.



Gambar 4.4 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Berdasarkan Gambar 4.3 diatas, gambar Scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar diatas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada disekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.1.11 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi Linear Berganda bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap suatu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas.

Rumus analisis regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Tabel 4.47 Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.487	4.142		1.325	.196
	TOTALX1	.811	.229	.574	3.540	.001
	TOTALX2	.302	.179	.274	1.689	.103
a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH						

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Berdasarkan Tabel 4.47 tersebut diperoleh regresi linear berganda sebagai berikut $Y = 5,487 + 0,811X_1 + 0,302 X_2$

Interprestasi dari persamaan linear berganda adalah :

1. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 5,487.
2. Jika terjadi peningkatan Akuntansi Sektor Publik 1, maka Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0,811.
3. Jika terjadi peningkatan Pengawas Internal sebesar 1, maka Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) akan meningkat sebesar 0,302.

4.1.12 Uji Kesesuaian (Test Goodness of Fit)

4.1.12.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F (Uji Simultan) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara simultan. Cara yang digunakan adalah dengan melihat level of significant (0,05). Adapun kriteria penerimaan / penolakan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

1. Tolak H_0 jika nilai probabilitas yang dihitung $<$ probalitas yang diterapkan sebesar 0,05 ($\text{sig} < \alpha$ 0,05)
2. Terima H_0 jika nilai probalitas yang dihitung $>$ probalitas yang ditetapkan sebesar 0,05 ($\text{sig} > \alpha$ 0,05).

Tabel 4.48 Uji Simultan ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1095.202	2	547.601	21.976	.000 ^a
	Residual	672.798	27	24.918		
	Total	1768.000	29			
a. Predictors: (Constant), TOTALX2, TOTALX1						
b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH						

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Berdasarkan Tabel 4.48 diatas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 21,976 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,34 yang dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat tampilan tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1.12.2 Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Nilai-nilai koefisien regresi dalam persamaan regresi merupakan hasil perhitungan berdasarkan sampel yang terpilih. Variabel bebas dikatakan berpengaruh terhadap variabel terikat bisa dilihat dari probabilitas variabel bebas dibandingkan dengan tingkat kesalahannya (α). Jika probabilitas variabel bebas lebih besar dari tingkat kesalahannya (α) maka variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Tabel 4.49 Uji Parsial Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.487	4.142		1.325	.196
	TOTALX1	.811	.229	.574	3.540	.001
	TOTALX2	.302	.179	.274	1.689	.103
a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH						

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Pada Tabel 4.49 Coefficient terlihat variabel Akuntansi Sektor Publik memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,540 dan signifikan 0,001, sedangkan variabel Pengawas Internal memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,689 dan signifikan 0,103. Nilai T_{tabel} untuk $n = 30$ dan $df = 28$ adalah 2,048.

Hal ini menunjukkan bahwa :

1. Variabel Akuntansi Sektor Publik Nilai t_{hitung} (3,540) > t_{tabel} (2,048) artinya menolak H_0 dan menerima H_a , kesimpulannya variabel Akuntansi Sektor Publik (X1) berpengaruh.
2. Variabel Pengawas Internal Nilai t_{hitung} (1,689) < t_{tabel} (2,048) artinya menolak H_a dan menerima H_0 , kesimpulannya variabel Pengawas Internal (X2) tidak berpengaruh.

Untuk taraf signifikansi :

1. Variabel Akuntansi Sektor Publik memiliki signifikansi $0,001 < 0,05$, artinya variabel Akuntansi Sektor Publik berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..
2. Variabel Pengawas Internal memiliki signifikansi $0,103 > 0,05$, artinya variabel Pengawas Internal tidak berpengaruh dan tidak signifikansi terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..

$$Y = 5,487 + 0,811X_1 - 0,302X_2 \quad (\text{Unstandarizes})$$

$$Y = 0,574X_1 - 0,2747X_2 \quad (\text{Standarized})$$

4.1.12.3 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi Variabel akuntansi sektor publik dan pengawas internal terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika koefisien determinasi (R^2) semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y dimana $0 < 1$. Sebaliknya, jika semakin kecil (mendekati nol), maka akan dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas adalah kecil terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Untuk memastikan tipe hubungan antar variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.50 Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.787 ^a	.619	.591	4.992
a. Predictors: (Constant), TOTALX2, TOTALX1				
b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH				

SUMBER: Hasil Penelitian SPSS Ver 16.0

Pada Tabel 4.41 Model Summary nilai R Square sebesar 0,619/ 61,9% dipilih karena tidak ditemukan permasalahan . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Intenal cukup mampu menjelaskan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 61,9% sedangkan sebesar 38,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini. Error model pada persamaan regresi sebesar 4,992 artinya jika dimasukkan dalam model.

4.2 Pembahasan Dan Hasil Peneltian

4.2.1 Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia

Hasil dari koefisien regresi menunjukkan bahwa $t_{hitung} 3,540 > t_{tabel} 2,048$ dan signifikan $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang menyatakan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

Menurut pemikiran Nordiawan (2010) akuntansi sektor publik adalah Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Dari hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Akuntansi sektor publik secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Desa Bandar Setia telah terlaksana dan selanjutnya hasil penelitian ini juga telah menyelesaikan / menjawab permasalahan yang ada di identifikasi masalah point No.1 dan 3 yaitu Konsep akuntabilitas sektor publik belum mampu diterapkan secara konsisten, hal ini disebabkan kurangnya ketaatan dan kepedulian dalam penerapan sistem akuntansi keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Masih terdapat kelemahan dalam

pengelolaan keuangan desa, yaitu masih terbatasnya jumlah personel pemerintah desa yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

4.2.2 Pengaruh Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia

Hasil dari koefisien regresi menunjukkan bahwa $t_{hitung} 1,689 < t_{tabel} 2,048$ dan signifikan $0,103 > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_o diterima, yang menyatakan Pengawas Internal tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

Menurut Swayer (2010), pengendalian internal adalah jenis pengawasan yang mencakup rencana organisasi dan semua metode dan koordinasi yang digunakan di perusahaan atau instansi untuk memastikan keamanan aset, memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Kebijakan manajemen. Dari hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pengawas Internal secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Desa Bandar Setia telah terlaksana dan selanjutnya hasil penelitian ini juga telah menyelesaikan / menjawab permasalahan yang ada diidentifikasi masalah point No.2 yaitu, Masih terdapat kelemahan dan ketidak mampuan pihak pengendalian internal dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya

4.2.3 Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa Bandar Setia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntansi Sektor Publik Pengawas Internal Pada Desa Bandar Setia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini terlihat dari analisis regresi linear berganda melalui uji F yang bertanda signifikan dengan nilai f_{hitung} sebesar 21,976 sedangkan f_{tabel} sebesar 3,34 yang dilihat pada $\alpha = 0,05$ probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) hipotesis dalam penelitian ini teruji dan dapat diterima.

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan) (LAN & BPKP, 2000) sistem akuntabilitas kinerja adalah memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan perilaku individu / badan hukum / kewajiban pemimpin organisasi. Pihak yang organisasi memiliki hak untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban.. Berdasarkan pengertian yang dijelaskan semua instansi pemerintah, bagian dan lembaga Negara daerah maupun pusat sesuai dengan tugas masing- masing harus memahami lingkup Akuntabilitasnya, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah didapatkan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Hasil Uji Simultan (F) dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 21,976 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,34 yang dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat tampilan tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Hasil Uji Parsial (t) , Variabel Akuntansi Sektor Publik Nilai t_{hitung} (3,546) $>$ t_{tabel} (2,048) dengan signifikan 0,001, artinya menolak H_0 dan menerima H_a , jadi variabel Akuntansi Sektor Publik (X1) berpengaruh dan Variabel Pengawas Internal Nilai t_{hitung} (1,689) $<$ t_{tabel} (2,048) dengan signifikan 0,103 artinya menolak H_a dan menerima H_0 , jadi variabel Pengawas Internal (X2) tidak berpengaruh.
3. Hasil Summary nilai R Square sebesar 0,619 / 61,9% menunjukkan bahwa variabel Akuntansi Sektor Publik dan Pengawas Internal cukup mampu menjelaskan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 61,9% sedangkan sebesar 38,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini. Error model pada persamaan regresi sebesar 4,992.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Desa Bandar Setia Deli Serdang, agar lebih meningkatkan penerapan atas sistem akuntansi yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Pemerintah Desa Bandar Setia juga harus lebih meningkatkan efektifitas pengawas internal agar akuntabilitas kinerja juga akan semakin baik.
2. Bagi Pegawai Desa Bandar Setia, diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada peneliti yang baik agar bisa berkomunikasi dengan efektif.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Dan Muhammad Syam Kusufi. 2018. Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat
- Basuki, T. A. & Prawoto, N. 2016. Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi Spss & Eviews). Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Deddi Nordiawan, 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi English For Specific Purpose (Esp) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, 9(2), 190-201.
- Gondodiyoto, Sanyoto. (2010). Pengelolaan Fungsi Audit Sistem Informasi. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Haryanto Dan Sahrudin Serta Arifuddin 2017. Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Indra Bastian, 2010. Akuntansi Sektor Publik Publik: Suatu Pengantar. Jakarta. Penerbit: Erlangga
- Indra Bastian. 2014. Akuntansi Sektor Publik. In: Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Universitas Terbuka
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). Unpab Lecturer Assessment And Performance Model Based On Indonesia Science And Technology Index. In Journal Of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, P. 012268). Iop Publishing.
- Jogiyanto Hartono. 2017. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman. Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta.
- Lawrence B. Sawyer, Mortimer A. Dittenhofer, James H.Scheiner. 2010. Sawyer's Internal Audit: Internal Audit Sawyer. Jakarta. Penerbit:Salemba4
- Ledvina 2010 "Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah"
- Lembaga Administrasi Negara (Lan) 1999 "Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah", Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara (Lan) 1999 "Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah", Jakarta
- Mardiasmo, 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit: Andi
- Maringan Masri Simbolon. 2013. Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen. Jakarta : Ghalia.
- Maringan Masri Simbolon. 2013. Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen. Jakarta : Ghalia.

- Nordiawan, Zdeddi 2010 “Pengertian Sektor Publik” Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Rosalin, Faristina. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada Blu Di Kota Semarang). Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang.
- Sarwenda Biduri. 2018. Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden Yield Dan Price Earning Ratio Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Situmorang, Syafrizal Helmi Dan Muhammad Lutfi. 2012. Analisis Data: Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis. Medan: Usu Press.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Pt Alfabet.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: Cv Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Cv Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suliyanto. 2018. Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, Dan Disertasi. Yogyakarta : Andi
- Supraja, G. (2020, April). The Influence Of Tax Amnesty Benefit Perception To Taxpayer Compliance. In *Proceedings Of The International Seminar* (Vol. 1, No. 1, Pp. 148-156).
- Urip Santoso, 2010. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektorpublik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. Issn: 0216-1249
- Yohannes Yahya. 2016. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.